

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN BIDANG PENANAMAN MODAL, PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
PADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PESIR SELATAN**

NO	JENIS IZIN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	MASA BERLAKU
1	2	3	4	5	6	7
<b>A.</b>	<b>PERIZINAN DIBIDANG PENANAMAN MODAL</b>					
<b>1</b>	<b>IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL</b>					
		1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal	1. Permohonan	Tidak ada biaya	3 (tiga) hari kerja apabila	1 (satu) tahun dan dapat
		2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009, tentang pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal.	2. Surat kuasa bagi pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh diirektur/pimpinan perusahaan		persyaratan lengkap dan benar	diperpanjang 1 kali
		3. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010, tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.	3. Foto Copy Akte Perusahaan			
		4. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Nomor 570/3732.A/SJ, Nomor: SE/08/M.	4. Profil perusahaan			
		PAN-RB/9/2010, Nomor : 12 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 perihal Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal Daerah	5. Foto Copy akte pendirian perusahaan			
		5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal BKPM Nomor 5 Tahun 2013, tentang Pedoman dan Tata cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.	6. Foto Copy Akta perubahan perusahaan ( bila ada )			
		6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2013, tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan	7. Surat Keterangan domisili Perusahaan			
			8. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)			
			9. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Direktur			
			10. Bukti penguasaan atas tanah			
			11. Proposal dan presentasi rencana Investasi.			
			12. Pemanfaatan Tata Ruang Daerah.			
			13. Rekomendasi Instansi teknis terkait bila dipersyaratkan.			
<b>2.</b>	<b>IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL</b>					
		1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal	1. Permohonan	Tidak ada biaya	5 (lima) hari kerja apabila	1 (satu) tahun dan dapat
		2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009, tentang pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal.	2. Surat kuasa bagi pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh diirektur/pimpinan perusahaan		persyaratan lengkap dan benar	diperpanjang 1 kali
		3. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010, tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.	3. Foto Copy Akte Perusahaan			
		4. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Nomor 570/3732.A/SJ, Nomor: SE/08/M.	4. Izin Prinsip Penanaman Modal			
		PAN-RB/9/2010, Nomor : 12 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 perihal Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal Daerah	5. Rencana Detail Perusahaan			
		5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal BKPM Nomor 5 Tahun 2013, tentang Pedoman dan Tata cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.	6. Bukti penguasaan atas tanah			
		6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2013, tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan	7. Proposal dan presentasi rencana Investasi.			
			8. Pemanfaatan Tata Ruang Daerah.			
			9. Laporan Kegiatan Penanaman Modal			
			10. Rekomendasi Instansi teknis terkait bila dipersyaratkan.			
<b>3.</b>	<b>IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL</b>					
		1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal	1. Permohonan	Tidak ada biaya	7 (tujuh) hari kerja apabila	1 (satu) tahun dan dapat
		2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009, tentang pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal.	2. Surat kuasa bagi pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh diirektur/pimpinan perusahaan		persyaratan lengkap dan benar	diperpanjang 1 kali

NO	JENIS IZIN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	MASA BERLAKU
1	2	3	4	5	6	7
		3. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010, tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di bidang Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.	3. Foto Copy Izin Prinsip Penanaman Modal			
		4. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Nomor 570/3732.A/SJ, Nomor: SE/08/M. PAN-RB/9/2010, Nomor : 12 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 perihal Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal Daerah	4. Foto Copy Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal (bila ada)			
		5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal BKPM Nomor : 5 Tahun 2013, tentang Pedoman dan Tata cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.	5. Foto Copy Rencana Perubahan Penanaman Modal			
		6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2013, tentang Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan.	6. Proposal dan presentasi rencana Investasi.			
			7. Pemanfaatan Tata Ruang Daerah.			
			8. Laporan Kegiatan Penanaman Modal			
			9. Rekomendasi Instansi teknis terkait bila dipersyaratkan.			
4.	IZIN USAHA PENANAMAN MODAL					
		1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal	1. Permohonan	Tidak ada biaya	7 (tujuh) hari kerja apabila	Izin berlaku selama kegiatan
		2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009, tentang pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal.	2. Surat kuasa bagi pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh diirektur/pimpinan perusahaan		persyaratan lengkap	usaha masih dijalankan
		3. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010, tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.	3. Profil Perusahaan		dan benar	
		4. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Nomor 570/3732.A/SJ, Nomor: SE/08/M. PAN-RB/9/2010, Nomor : 12 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 perihal Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal Daerah	4. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan			
		5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal BKPM Nomor 5 Tahun 2013, tentang Pedoman dan Tata cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.	5. Foto Copy Akta Perubahan Perusahaan (bila ada)			
		6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2013, tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan	6. Surat Keterangan Domisili Perusahaan			
			7. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)			
			8. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Direktur			
			9. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)			
			10. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)			
			11. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)			
			12. Foto Copy Izin Prinsip Penanaman Modal			
			13. Laporan Kegiatan Penanaman Modal			
			14. Bukti Penguasaan atas Tanah			
			15. Izin Gangguan			
			16. Izin Mendirikan Bangunan IMB, (bagi yang memiliki bangunan)			
			17. Proposal dan Presentasi Rencana Investasi			
			18. Pemanfaatan Tata Ruang Daerah			
			19. Izin Lingkungan (Amdal, UPL-UKL)			
			20. Rekomendasi Instansi teknis terkait bila dipersyaratkan.			
5.	IZIN USAHA PERLUASAN PENANAMAN MODAL					
		1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal	1. Permohonan	Tidak ada biaya	7 (tujuh) hari kerja apabila	Izin berlaku selama kegiatan
		2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009, tentang pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal.	2. Surat kuasa bagi pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh diirektur/pimpinan perusahaan		persyaratan lengkap	usaha masih dijalankan
		3. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010, tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.	3. Profil Perusahaan		dan benar	
		4. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Nomor 570/3732.A/SJ, Nomor: SE/08/M.	4. Rencana Perluasan Penanaman Modal			
			5. Foto Copy Izin Usaha Penanaman Modal			
			6. Laporan Kegiatan Penanaman Modal tahun terakhir			
			7. Bukti Penguasaan atas Tanah			
			8. Izin Gangguan			

NO	JENIS IZIN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	MASA BERLAKU
1	2	3	4	5	6	7
		PAN-RB/9/2010, Nomor : 12 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010	9. Izin Mendirikan Bangunan IMB, (bagi yang memiliki bangunan)			
		perihal Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal Daerah	10. Proposal dan Presentasi Rencana Perluasan Investasi			
		5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal BKPM Nomor	11. Pemanfaatan Tata Ruang Daerah			
		5 Tahun 2013, tentang Pedoman dan Tata cara Perizinan dan Nonperizinan	12. Izin Lingkungan (Amdal, UPL-UKL)			
		Penanaman Modal.	13. Rekomendasi Instansi teknis terkait bila dipersyaratkan.			
		6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2013, tentang				
		Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman				
		Modal, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Penanaman Modal				
		dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan				
6.	<b>IZIN USAHA PERUBAHAN PENANAMAN MODAL</b>					
		1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal	1. Permohonan	Tidak ada biaya	7 (tujuh) hari kerja apabila	Izin berlaku selama kegiatan
		2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009, tentang pelayanan Terpadu	2. Surat kuasa bagi pengurusan permohonan yang tidak dilakukan		persyaratan lengkap	usaha masih dijalankan
		Satu Pintu dibidang Penanaman Modal.	secara langsung oleh diirektur/pimpinan perusahaan		dan benar	
		3. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010, tentang Daftar Bidang Usaha	3. Profil Perusahaan			
		yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di	4. Rencana Perluasan Penanaman Modal			
		Bidang Penanaman Modal.	5. Foto Copy Izin Usaha Penanaman Modal			
		4. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan	6. Laporan Kegiatan Penanaman Modal tahun terakhir			
		Aparatur Negara dan Reformasi dan Kepala Badan Koordinasi dan	7. Bukti Penguasaan atas Tanah			
		Penanaman Modal (BKPM) Nomor 570/3732.A/SJ, Nomor: SE/08/M.	8. Izin Gangguan			
		PAN-RB/9/2010, Nomor : 12 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010	9. Izin Mendirikan Bangunan IMB, (bagi yang memiliki bangunan)			
		perihal Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal Daerah	10. Proposal dan Presentasi Rencana Perluasan Investasi			
		5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal BKPM Nomor	11. Pemanfaatan Tata Ruang Daerah			
		5 Tahun 2013, tentang Pedoman dan Tata cara Perizinan dan Nonperizinan	12. Izin Lingkungan (Amdal, UPL-UKL)			
		Penanaman Modal.	13. Rekomendasi Instansi teknis terkait bila dipersyaratkan.			
		6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2013, tentang				
		Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman				
		Modal, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Penanaman Modal				
		dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan				
7.	<b>IZIN USAHA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN</b>					
	<b>PENANAMAN MODAL (MERGER)</b>					
		1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal	1. Permohonan	Tidak ada biaya	14 (empat belas) hari	Izin berlaku selama kegiatan
		2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009, tentang pelayanan Terpadu	2. Surat kuasa bagi pengurusan permohonan yang tidak dilakukan		kerja apabila persyaratan	usaha masih dijalankan
		Satu Pintu dibidang Penanaman Modal.	secara langsung oleh diirektur/pimpinan perusahaan		lengkap dan benar	
		3. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010, tentang Daftar Bidang Usaha	3. Profil Perusahaan			
		yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di	4. Foto Copy Izin Prinsip/ Perubahan Penanaman Modal			
		Bidang Penanaman Modal.	5. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan			
		4. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan	6. Foto Copy NPWP Perusahaan			
		Aparatur Negara dan Reformasi dan Kepala Badan Koordinasi dan	7. Kesepakatan Penggabungan Perusahaan yang dituangkan			
		Penanaman Modal (BKPM) Nomor 570/3732.A/SJ, Nomor: SE/08/M.	dalam bentuk kesepakatan perubahan kepemilikan saham			
		PAN-RB/9/2010, Nomor : 12 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010	dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk risalah rapat			
		perihal Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal Daerah	umum pemegang saham (RUPS/Keputusan sirkuler seluruh			
		5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal BKPM Nomor	pemegang saham/ akta perubahan dalam bentuk keputusan /			
		5 Tahun 2013, tentang Pedoman dan Tata cara Perizinan dan Nonperizinan	Akta Perubahan dalam bentuk keputusan rapat/ berita acara.			
		Penanaman Modal.	8. Laporan Kegiatan Penanaman Modal tahun terakhir			
		6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2013, tentang	9. Legalitas Pekerjaan			
		Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman	10. Bukti Penguasaan atas Tanah			
		Modal, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Penanaman Modal	11. Izin Gangguan			
		dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan	12. Izin Mendirikan Bangunan IMB, (bagi yang memiliki bangunan)			

NO	JENIS IZIN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	MASA BERLAKU
1	2	3	4	5	6	7
			13. Proposal dan Presentasi Rencana Penggabungan perusahaan penanaman modal			
			11. Pemanfaatan Tata Ruang Daerah			
			12. Izin Lingkungan (Amdal, UPL-UKL)			
			13. Rekomendasi Instansi teknis terkait bila dipersyaratkan.			
<b>B. PERIZINAN DIBIDANG PEKERJAAN UMUM</b>						
1	<b>IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN</b>					
a)	<b>IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (FUNGSI USAHA, GANDA/ CAMPURAN, KHUSUS, KEAGAMAAN, )</b>					
		1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007, tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan.	1. Permohonan	Terlampir	5 (lima) hari kerja apabila	Izin berlaku selama
		2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.	2. Foto Akta Pendirian Perusahaan Perusahaan bagi Perusahaan yang berbadan hukum		persyaratan lengkap dan benar	bangunan tetap pada bentuk permohonan (tidak direnovasi)
		3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012, tentang Retribusi Perizinan Tertentu.	3. Bukti Kepemilikan Tanah			
		4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2013, tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan.	4. Surat Persetujuan Tetangga/lingkungan diketahui oleh Wali Nagari setempat			
			5. Berita Acara Komisi Kecamatan			
			6. Denah Lokasi Rencana Pembangunan			
			7. Rekomendasi Camat			
			8. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk			
			9. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm berwarna, sebanyak 2 (dua) lembar			
			10. Izin Prinsip Penanaman Modal (bagi yang dipersyaratkan)			
			11. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bangunan			
			12. Pemanfaatan Tata Ruang Daerah.			
			13. Foto Copy Izin Lingkungan (Amdal, UKL-UPL), apabila dipersyaratkan.			
			14. Rekomendasi Instansi teknis terkait apabila dipersyaratkan			
b)	<b>IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (FUNGSI KEAGAMAAN)</b>					
		1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007, tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan.	1. Permohonan	Tidak ada biaya	5 (lima) hari kerja apabila	Izin berlaku selama
		2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.	2. Bukti kepemilikan Tanah		persyaratan lengkap dan benar	bangunan tetap pada bentuk permohonan (tidak direnovasi)
		3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012, tentang Retribusi Perizinan Tertentu.	3. Surat Persetujuan Tetangga/lingkungan diketahui oleh wali nagari setempat			
		4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2013, tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan.	4. Berita Acara Komisi Kecamatan			
			5. Denah Lokasi Rencana Pembangunan			
			6. Rekomendasi Camat			
			7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk			
			8. Foto Copy Persetujuan Rumah Ibadah Terdekat			
			9. Foto Copy Kartu Penduduk Ketua Rumah Ibadah			
			10. Foto Copy Susunan Pengurus			
			11. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm berwarna, sebanyak 2 (dua) lembar			
			12. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bangunan			
			13. Rekomendasi instansi teknis terkait apabila dipersyaratkan			
			14. Foto Copy Izin Lingkungan apabila dipersyaratkan			
c)	<b>IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (FUNGSI KHUSUS)</b>					
		1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007, tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan.	1. Permohonan	Terlampir	5 (lima) hari kerja apabila	Izin berlaku selama
		2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.	2. Bukti kepemilikan Tanah		persyaratan lengkap dan benar	bangunan tetap pada bentuk permohonan (tidak direnovasi)
			3. Surat Persetujuan Tetangga/lingkungan diketahui oleh wali nagari setempat			

NO	JENIS IZIN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	MASA BERLAKU
1	2	3	4	5	6	7
		3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012, tentang Retribusi Perizinan Tertentu.	4. Berita Acara Komisi Kecamatan 5. Denah Lokasi Rencana Pembangunan			
		4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2013, tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan.	6. Rekomendasi Camat 7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk 8. Foto Copy Akta Notaris 9. Foto Copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian hukum dan Hak Azazi Manusia bagi Perseroan Terbatas 10. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (nomor 7,8 dan 9 bagi perusahaan yang berbadan hukum) 11. Izin Prinsip Penanaman Modal (bagi yang dipersyaratkan) 12. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm berwarna, sebanyak 2 (dua) lembar 13. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bangunan 14. Pemanfaatan Tata Ruang Daerah 15. Rekomendasi instansi teknis terkait apabila dipersyaratkan 16. Foto Copy Izin Lingkungan apabila dipersyaratkan			
d)	<b>IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN FUNGSI GANDA/ CAMPURAN</b>					
		1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007, tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012, tentang Retribusi Perizinan Tertentu. 4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2013, tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan.	1. Permohonan 2. Bukti kepemilikan Tanah 3. Surat Persetujuan Tetangga/lingkungan diketahui oleh wali nagari setempat 4. Berita Acara Komisi Kecamatan 5. Denah Lokasi Rencana Pembangunan 6. Rekomendasi Camat 7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk 8. Foto Copy Akta Notaris 9. Foto Copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian hukum dan Hak Azazi Manusia bagi Perseroan Terbatas 10. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (nomor 7,8 dan 9 bagi perusahaan yang berbadan hukum) 11. Izin Prinsip Penanaman Modal (bagi yang dipersyaratkan) 12. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm berwarna, sebanyak 2 (dua) lembar 13. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bangunan 14. Pemanfaatan Tata Ruang Daerah 15. Rekomendasi instansi teknis terkait apabila dipersyaratkan 16. Foto Copy Izin Lingkungan apabila dipersyaratkan	Terlampir	5 (lima) hari kerja apabila persyaratan lengkap dan benar	Izin berlaku selama bangunan tetap pada bentuk permohonan (tidak direnovasi)
e)	<b>IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN FUNGSI SOSIAL BUDAYA</b>					
		1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007, tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012, tentang Retribusi Perizinan Tertentu.	1. Permohonan 2. Bukti kepemilikan Tanah 3. Surat Persetujuan Tetangga/lingkungan diketahui oleh wali nagari setempat 4. Berita Acara Komisi Kecamatan 5. Denah Lokasi Rencana Pembangunan	Terlampir	5 (lima) hari kerja apabila persyaratan lengkap dan benar	Izin berlaku selama bangunan tetap pada bentuk permohonan (tidak direnovasi)

NO	JENIS IZIN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	MASA BERLAKU
1	2	3	4	5	6	7
		4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2013, tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan.	6. Rekomendasi Camat 7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk 8. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm berwarna, sebanyak 2 (dua) lembar 9. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bangunan 10. Pemanfaatan Tata Ruang Daerah 11. Rekomendasi instansi teknis terkait apabila dipersyaratkan 12. Foto Copy Izin Lingkungan apabila dipersyaratkan			
<b>2 SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (SIUJK)</b>						
		1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang penerbitan IUJK 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012, tentang Retribusi Perizinan Tertentu 3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2013, tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan.	1. Permohonan 2. Foto Copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan 3. Foto Copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian hukum dan Hak Azazi Manusia bagi Perseroan Terbatas 4. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 5. Foto kartu Tanda Penduduk (KTP) 6. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 7. Kartu Tanda Anggota (KTA) Pelayanan Jasa Konstruksi 8. Foto Copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) 9. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm berwarna, sebanyak 2 (dua) lembar 10. SKK (Sertifikat Keterampilan Kerja) 11. Rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan.	Tidak ada biaya	1 (satu) hari kerja apabila persyaratan lengkap dan benar.	Izin berlaku selama 2 (dua) tahun sesuai masa berlaku Sertifikat Badan Usaha.
<b>3 IZIN PEMASANGAN REKLAME</b>						
		1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 122 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 - 2035 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. 4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2013, tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan.	1. Permohonan 2. Foto Copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan 3. Foto Copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian hukum dan Hak Azazi Manusia bagi Perseroan Terbatas (nomor 1 dan 2 apabila perusahaan berbadan hukum) 4. Foto Copy perjanjian/ sewa menyewa tanah apabila tanah atau bangunan yang digunakan milik orang lain 5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 6. Foto Copy Teks Reklame 7. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm berwarna, sebanyak 2 (dua) lembar 8. Foto Copy SITU 9. Foto Copy IMB bagi yang dipersyaratkan 10. Rekomendasi dari Instansi Teknis terkait.	Terlampir	3 (tiga) hari kerja apabila persyaratan lengkap dan benar	Izin berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
<b>C. PERIZINAN BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>						
<b>1.</b>	<b>IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)</b>					
	<b>1. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) BARU</b>					
	<b>a. Perusahaan Berbentuk Perseroan Terbatas (PT)</b>	1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M/DAG/PER/9 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi Perindustrian dan perdagangan nomor 46/M-DAG/PER/9/2009, Tentang Perubahan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.	1. Permohonan 2. Surat kuasa bagi pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh diirektur/pimpinan Perusahaan 3. Foto Copy Akta Notaris Pendiri Perusahaan 4. Foto copy akta perubahan perusahaan (bila ada)	Tidak dikenakan biaya	Dua hari sepanjang persyaratan lengkap	Izin berlaku selama kegiatan usaha masih dijalankan dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali

NO	JENIS IZIN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	MASA BERLAKU
1	2	3	4	5	6	7
		3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M/DAG/PER/12/2011, Tentang Perubahan kedua diatas Perubahan Menteri Perdagangan Nomor 36/M/DAG/PER/9/2007, Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan .	5. Foto Copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan terbatas dari Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manuasia.			
		4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2013, Tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal	6. Foto Copy Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab atau Direktur Utama Perusahaan.			
		Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan.	7. Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP Tentang Lokasi Perusahaan			
			8. Pas Photo Penanggung jawab atau Direktur Utama Perusahaan ukuran 3 x 4, sebanyak 2 (dua) lbr.			
			9. Materai Rp. 6.000 2 (dua) lbr			
			10. Rekomendasi Instansi Teknis bila dipersyaratkan.			
	<b>b. Perusahaan Berbentuk Koperasi</b>		1. Permohonan,	Tidak dikenakan biaya	Dua hari sepanjang persyaratan lengkap	Izin berlaku selama kegiatan usaha masih dijalankan dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali
			2. Surat kuasa bagi pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh diirektur/pimpinan perusahaan			
			3. Foto copy Akta Notaris Pendirian Koperasi yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang.			
			4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Penanggung jawab atau pengurus Koperasi.			
			5. Foto Copy Struktur Organisasi Koperasi diketahui Dinas Teknis			
			6. Surat Pernyataan dari pemohon tentang lokasi usaha Koperasi			
			7. Pas Photo penanggung Jawab atau pengurus Koperasi Ukuran 3 x 4 , sebanyak 2 (dua) Lembar.			
			8. Materai Rp. 6.000,- 2 (dua) lbr			
			9. Rekomendasi Instansi Teknis bila dipersyaratkan.			
	<b>c. Perusahaan yang Berbentuk CV dan Firma</b>		1. Permohonan,	Tidak dikenakan biaya	Dua hari sepanjang persyaratan lengkap	Izin berlaku selama kegiatan usaha masih dijalankan dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali
			2. Surat kuasa bagi pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh diirektur/pimpinan perusahaan Perusahaan			
			3. Foto Copy Akta Notaris PendirianPerusahaan atau Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri.			
			4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk pemilik atau pengurus atau Penanggung Jawab Perusahaan.			
			5. Surat Pernyataan dari pemohon tentang lokasi usaha Koperasi			
			6. Pas Photo pemilik atau pengurus atau penanggung jawab Perusahaan ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lbr			
			7. Materai Rp. 6.000 2 (dua) lbr			
			8. Rekomendasi Instansi Teknis bila dipersyaratkan.			
	<b>d. Perusahaan yang Berbentuk Perorangan</b>		1. Permohonan, ditandatangani diatas materai cukup oleh direktur/pemimpin perusahaan, atau Surat Kuasa untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara Langsung oleh direksi /pimpinan perusahaan.	Tidak dikenakan biaya	Dua hari sepanjang persyaratan lengkap	Izin berlaku selama kegiatan usaha masih dijalankan dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali
			2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemilik atau penanggung Jawab Perusahaan.			
			3. Surat Pernyataan dari Pemohon tentang lokasi usaha koperasi			
			4. Pas Photo pemilik atau penanggung jawab perusahaan ukuran 3 x 4 , sebanyak 2 (dua) lembar			
			5. Materai Rp. 6.000 2 (dua) lbr			
			6. Rekomendasi Instansi Teknis bila dipersyaratkan.			

NO	JENIS IZIN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	MASA BERLAKU
1	2	3	4	5	6	7
2	SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) PENDAFTARAN ULANG		1. Permohonan, 2. Surat Kuasa untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direktur/Pimpinan Perusahaan 3. Surat Izin Usaha Perdagangan yang Asli. 4. Neraca Perusahaan (Tahun terakhir khusus untuk perseroan Terbatas) 5. Surat pernyataan dari pemohon tentang lokasi usaha Perusahaan	Tidak dikenakan biaya	Dua hari sepanjang persyaratan lengkap	Izin berlaku selama kegiatan usaha masih dijalankan dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali
3	SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) PEMBUKAAN KANTOR CABANG/PERWAKILAN		6. Pas Photo penanggung jawab atau pemilik perusahaan ukuran 3 x 4, sebanyak 2 (dua) lembar 7. Materai Rp. 6.000 2 (dua) lbr 8. Rekomendasi Instansi Teknis terkait			
			1. Permohonan, 2. Surat Kuasa untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direktur/Pimpinan Perusahaan 3. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan Kantor Pusat Perusahaan yang telah dilegalisir oleh Pejabat Penerbit Surat Izin Usaha Perdagangan. 4. Foto Copy Dokumen pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan. 5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dan surat penunjukan sebagai penanggung jawab Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan. 6. Surat Pernyataan dari pemohon tentang lokasi usaha kantor cabang/perwakilan perusahaan. 7. Materai Rp. 6.000 2 (dua) lbr 8. Rekomendasi Instansi Teknis terkait bila dipersyaratkan.	Tidak dikenakan biaya	Dua hari sepanjang persyaratan lengkap	Izin berlaku selama kegiatan usaha masih dijalankan dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali
4	SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) PERUBAHAN		1. Permohonan, 2. Surat Kuasa untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direktur/pimpinan perusahaan 3. Surat Izin Usaha Perdagangan asli. 4. Neraca Perusahaan (Tahun terakhir khusus untuk perseroan terbatas) 5. Data Pendukung Perubahan. 6. Pas Photo pemilik atau penanggung jawab perusahaan ukuran 3 x 4, sebanyak 2 (dua) lembar 7. Materai Rp. 6.000 2 (dua) lbr 8. Rekomendasi Instalasi teknis terkait bila dipersyaratkan.	Tidak dikenakan biaya	Dua hari sepanjang persyaratan lengkap	Izin berlaku selama kegiatan usaha masih dijalankan dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali
5	SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) PENGANTIAN					
	A. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) Yang Hilang		1. Permohonan, 2. Surat kuasa untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direktur/pimpinan perusahaan. 3. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian.	Tidak dikenakan biaya	Dua hari sepanjang persyaratan lengkap	Izin berlaku selama kegiatan usaha masih dijalankan dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali



NO	JENIS IZIN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	MASA BERLAKU
1	2	3	4	5	6	7
			4. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan lama.			
			5. Pas photo pemilik atau penanggung jawab perusahaan ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lbr			
			6. Materai Rp. 6.000 2 (dua) lbr			
			7. Rekomendasi Instansi terkait bila dipersyaratkan.			
	<b>B. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)</b>					
	<b>Yang Rusak</b>		1. Permohonan,	Tidak dikenakan bi	Dua hari sepanjang	Izin berlaku selama kegiatan
			2. Surat kuasa untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan		persyaratan lengkap	usaha masih dijalankan dan
			secara langsung oleh direktur /pimpinan perusahaan.			wajib didaftar ulang setiap 5
			3. Surat Izin Usaha Perdagangan lama.			(lima) tahun sekali
			4. Pas photo pemilik atau penanggung jawab perusahaan ukuran 3 x 4, sebanyak 2 (dua) lembar			
			5. Materai Rp. 6.000 2 (dua) lbr			
			6. Rekomendasi Instansi Teknis bila dipersyaratkan.			
2	<b>TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)</b>					
		1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.				
		2. Peraturan menteri Perdagangan Nomor 37/M/DAG/PER/9/2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.				
		3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2009, Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.				
		4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2013, Tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman				
		Modal, Perizinan dan Non Perizinan kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan				
	<b>1. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) BARU</b>					
	<b>a. Perusahaan Berbentuk Perseroan Terbatas (PT)</b>		1. Permohonan,	Tidak dikenakan bi	3 (tiga) hari kerja apabila	Izin berlaku selama lima tahu
			2. Foto Copy Izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.		persyaratan lengkap dan benar.	dan dapat diperpanjang sesuai keterangan yang beraku.
			3. Surat kuasa untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direktur/pimpinan perusahaan.			
			4. Foto copy Akta notaris pendirian perusahaan.			
			5. Foto copy surat keputusan pengesahan badan hukum perseroan terbatas dari kementerian hukum dan Ham			
			6. Foto Copy Akta Pendirian Perseroan (Bila ada)			
			7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab atau Direktur Utama Perusahaan.			
			8. Foto Copy NPWP			
			9. Materai Rp. 6.000 1 (Satu) lbr			
			10. Rekomendasi Instansi Teknis terkait, bila dipersyaratkan			
	<b>b. Perusahaan Berbentuk Koperasi</b>		1. Permohonan,	Tidak dikenakan bi	3 (tiga) hari kerja apabila	Izin berlaku selama lima tahu
			2. Foto copy Izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.		persyaratan lengkap dan benar.	dan dapat diperpanjang sesuai keterangan yang beraku.
			3. Surat Kuasa untuk pengurusan pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direktur/pimpinan Perusahaan			
			4. Foto copy akta pendirian Koperasi.			

NO	JENIS IZIN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	MASA BERLAKU
1	2	3	4	5	6	7
			5. Foto copy surat pengesahan badan hukum dari pejabat yang Berwenang.			
			6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua Koperasi			
			7. Materai Rp. 6.000,- 1 (satu) lbr			
			8. Rekomendasi instansi teknis terkait, bila dipersyaratkan			
	c. Perusahaan yang Berbentuk CV		1. Permohonan,	Tidak dikenakan biaya	3 (tiga) hari kerja apabila persyaratan lengkap dan benar.	Izin berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang sesuai keterangan yang beraku.
			2. Foto Copy Izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.			
			3. Surat kuasa untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direktur/pimpinan Perusahaan.			
			4. Foto copy akta notaris pendirian perusahaan yang telah didaftarkan pada pengadilan negeri setempat.			
			5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung jawab atau Direktur perusahaan.			
			6. Foto copy NPWP			
			7. Materai Rp. 6.000.- 1 (satu) lbr			
			8. Rekomendasi Instansi teknis terkait, bila dipersyaratkan.			
	d. Perusahaan yang Berbentuk Perorangan		1. Permohonan,	Tidak dikenakan biaya	3 (tiga) hari kerja apabila persyaratan lengkap dan benar.	Izin berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang sesuai keterangan yang beraku.
			2. Foto copy Izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.			
			3. Surat kuasa untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direktur/pimpinan perusahaan.			
			4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)			
			5. Foto Copy NPWP.			
			6. Materai Rp. 6.000 1 (satu) lbr			
			7. Rekomendasi Instansi teknis terkait, bila dipersyaratkan			
	f. Perusahaan yang berbentuk badan usaha lain		1. Permohonan.	Tidak dikenakan biaya	3 (tiga) hari kerja apabila persyaratan lengkap dan benar.	Izin berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang sesuai keterangan yang beraku.
			2. Foto copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.			
			3. Surat kuasa untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direktur/pimpinan perusahaan.			
			4. Foto copy akta notaris pendirian perusahaan yang telah didaftarkan pada pengadilan negeri setempat.			
			5. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) Penanggung jawab atau Direktur perusahaan.			
			6. Foto Copy NPWP			
			7. Mterai Rp. 6.000 1 (Satu) lbr			
			8. Rekomendasi Instansi teknis terkait, bila dipersyaratkan.			
	2. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) PENDAFTARAN ULANG					
			1. Permohonan.	Tidak dikenakan biaya	3 (tiga) hari kerja apabila persyaratan lengkap dan benar.	Izin berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang sesuai keterangan yang beraku.
			2. Tanda Daftar Perusahaan Asli			
			3. Materai Rp. 6.000 1 (satu) lbr			
			4. Rekomendasi Instansi Teknis terkait, bila dipersyaratkan			

NO	JENIS IZIN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	MASA BERLAKU
1	2	3	4	5	6	7
	<b>3. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)</b>					
	<b>PEMBUKAAN KANTOR CABANG/PERWAKILAN</b>		1. Permohonan.	Tidak dikenakan biaya	3 (tiga) hari kerja apabila persyaratan lengkap dan benar.	Izin berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang sesuai keterangan yang beraku.
			2. Foto Copy Izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.			
			3. Surat kuasa untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan			
			4. Surat penunjukan atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu sebagai kantor cabang, kantor pembantu dan perwakilan Perusahaan.			
			5. Foto copy pendirian perusahaan yang telah didaftarkan pada Pengadilan negeri setempat.			
			6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung jawab atau Direktur Perusahaan.			
			7. Foto copy NPWP			
			8. Materai Rp. 6.000 1 (satu) lbr			
			9. Rekomendasi Instansi Teknis terkait, bila dipersyaratkan.			
	<b>4. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) PERUBAHAN</b>					
			1. Permohonan.	Tidak dikenakan biaya	3 (tiga) hari kerja apabila persyaratan lengkap dan benar.	Izin berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang sesuai keterangan yang beraku.
			2. Foto copy Izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.			
			3. Surat kuasa untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direktur/Pimpinan perusahaan.			
			4. Tanda daftar Perusahaan Asli			
			5. Data pendukung perubahan.			
			6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung jawab atau Direktur Perusahaan.			
			7. Materai Rp. 6.000,- 1 (satu) lbr			
			8. Rekomendasi Instansi Teknis terkait, bila dipersyaratkan.			
	<b>5. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) PENGGANTIAN</b>			Tidak dikenakan biaya	3 (tiga) hari kerja apabila persyaratan lengkap dan benar.	Izin berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku
	<b>A. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) Yang hilang</b>		1. Permohonan.			
			2. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian.			
			3. Foto copy tanda daftar perusahaan lama.			
	<b>B. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) Yang rusak</b>					
			1. Permohonan.	Tidak dikenakan biaya	3 (tiga) hari kerja apabila persyaratan lengkap dan benar.	5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku
			2. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan lama			
<b>3</b>	<b>TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)</b>					
		1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984, tentang Perindustrian.	1. Permohonan.	Tidak dikenakan biaya	3 (tiga) hari kerja apabila persyaratan lengkap dan benar.	Izin berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang sesuai keterangan yang beraku.
		2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41 M/IND/PER/6/2008, Tentang Ketentuan dan Tata Cara pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.	2. Surat Kuasa untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direktur/pimpinan perusahaan.			
		3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2013, tentang Pendelegasian urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan.	3. Foto copy surat tempat usaha (SITU)			
			4. Foto copy izin gangguan (HO)			
			5. Foto copy KTP			
			6. Materai Rp. 6.000, sebanyak 2 (dua) lbr			
			7. Data peralatan kapasitas produksi, modal dan tenaga kerja/blangko			

NO	JENIS IZIN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	MASA BERLAKU
1	2	3	4	5	6	7
			isian TDI (Form Pdf.1 -IK).			
			8. Khusus untuk CV, mencantumkan.			
			A. Foto copy Akta Pendirian.			
			B. Foto Copy NPWP			
			9. Khusus untuk perseroan terbatas (PT) dan Koperasi, selain			
			Persyaratan tersebut diatas dilengkapi dengan			
			A. Surat Keputusan Menteri Hukum (Khusus PT)			
			B. Surat Keputusan Menteri Koperasi (Khusus Koperasi)			
			C. Data Akta			
4	IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)					
		1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984, Tentang Perindustrian.	1. Permohonan.	Tidak dikenakan bi	3 (tiga) hari kerja apabila	Izin berlaku selama lima tahu
		2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008, Tentang	2. Surat kuasa untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan		persyaratan lengkap dan	dan dapat diperpanjang
		Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan	secara langsung oleh direktur/pimpinan perusahaan.		benar.	sesuai keterangan yang
		Tanda Daftar Industrian.	3. Foto copy izin prinsip penanaman modal			beraku.
		3. Peraturan Bupati Peisir Selatan Nomor 23 Tahun 2013, Tentang	4. foto copy surat tempat usaha (SITU)			
		Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman	5. Foto copy izin gangguan (HO)			
		Modal, Perizinan dan Non Perizinan kepada Kantor Penanaman Modal dan	6. Foto Copy IMB			
		Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan.	7. Foto copy KTP			
			8. Foto copy NPWP			
			9. Materai Rp. 6.000, sebanyak 2 (dua) lbr			
			10. Data Peralatan, kapasitas produksi, modal dan tenaga kerja/			
			blanko isian IUI (Form SP-III)			
			11. Perusahaan yang berbadan hukum melampirkan Akte Pendirian			
			Perusahaan:			
			A. Khusus PT Pengesahan Badan Hukum dari Kementrian			
			Hukum HAM			
			B. Khusus Koperasi pengesahan badan hukum.			
			12. Bukti Penguasaan Tanah			
			13. Izin Lokasi			
			14. Pemanfaatan ruang dari Pemerintah Daerah			
			15. Izin Lingkungan (Amdal, UKL-UPL)			
			16. Rekomendasi Instansi Teknis bila dipersyaratkan			
5	TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)					
		1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006, Tentang	1. Permohonan.	Tidak dikenakan bi	3 (tiga) hari kerja apabila	Izin berlaku selama lima tahu
		Penataan dan Pembinaan Pergudangan.	2. Surat kuasa untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan		persyaratan lengkap dan	dan dapat diperpanjang
		2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2013, Tentang Pendelega	secara langsung oleh Direktur/Pimpinan Perusahaan.		benar.	sesuai keterangan yang
		Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan	3. Foto copy Surat Tempat Usaha (SITU)			beraku.
		Non Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan.	4. Foto Copy Izin Gangguan (HO)			
			5. Foto Copy IMB			
			6. Foto copy KTP			
			7. Foto Copy NPWP			
			8. Materai Rp. 6.000 sebanyak 2 (dua) lbr			
			9. Perusahaan yang berbadan hukuman melampirkan Akte Pendirian			
			Perusahaan.			
			1. Khusus PT Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian			
			Hukum HAM			
			2. Khusus Koperasi pengesahan Badan Hukum			

NO	JENIS IZIN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	MASA BERLAKU
1	2	3	4	5	6	7
			10. Perjanjian sewa menyewa tempat			
	<b>D. PERIZINAN DIBIDANG PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>					
	<b>1. IZIN USAHA JASA LAYANAN INTERNET/ WARNET</b>					
		1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi	1. Permohonan	tidak ada biaya	3 (tiga) hari kerja	Izin berlaku selama
		2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	2. Foto Copy Akta Perusahaan bagi yang berbadan hukum		apabila persyaratan	kegiatan usaha masih
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi	3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)		lengkap dan benar	dijalankan, dievaluasi
		4. Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.Kominfo/04/2009 tentang pedoman pelaksanaan urusan pemerintah sub. Bidang pos telekomunikasi	4. Foto Copy NPWP			setiap tahunnya dan wajib
		5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2011, Tentang Pedoman Usaha Jasa Layanan Akses Internet	5. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm berwarna, sebanyak 2 (dua) lembar			menyampaikan laporan
		6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2013, tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan	6. Surat Pernyataan Tidak Keberatan tetangga/ lingkungan diketahui wali nagari			kepada instansi penerbit
			7. Foto Copy Izin Gangguan			izin secara berkala
			8. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)			
			9. Denah Lokasi			
			10. Rekomendasi Instansi teknis terkait bila dipersyaratkan			
	<b>2. IZIN MENDIRIKAN TOWER MENARA TELEKOMUNIKASI</b>					
		1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi	1. Permohonan	tidak ada biaya	7 (tujuh) hari kerja	Izin berlaku selama
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	2. Surat kuasa untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi / pimpinan perusahaan		apabila persyaratan	kegiatan usaha masih
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi	3. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan yang berbadan hukum		lengkap dan benar	dijalankan.
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit satelit	4. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)			
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Pekerjaan	5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk			
		6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi	6. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm berwarna, sebanyak 2 (dua) lembar			
		7. Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi	7. Surat Keputusan ketinggian menara/ tower Dinas Perhubungan Propinsi			
		8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tetentu	8. Sertifikat Bebas Radiasi Berbahaya			
		9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011, tentang rencana tata ruang wilayah	9. Izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar			
		10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2013, tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan	10. RAB Tower			
			11. Pernyataan Izin warga diketahui oleh wali nagari dan camat setempat			
			12. Status Tanah			
			13. Foto Copy Izin Gangguan			
			14. Foto Copy IMB			
			15. Rekomendasi Instansi teknis terkait bila dipersyaratkan.			
	<b>3. IZIN USAHA KENDARAAN BERMOTOR UMUM</b>					
		1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Angkutan Jalan Raya Umum	1. Permohonan	tidak ada biaya	14 (empat belas) hari kerja	Izin berlaku selama
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	2. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan yang berbadan hukum		apabila persyaratan	kegiatan usaha masih
		3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2013, tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan	3. Memiliki Surat Izin Usaha Angkutan		lengkap dan benar	dijalankan.
			4. Menandatangani Surat Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban memegang izin trayek.			
			5. Memiliki / menguasai kendaraan bermotor yang layak jalan yang dibuktikan dengan foto copy STNK sesuai domisili perusahaan dan foto copy uji kendaraan bermotor			

NO	JENIS IZIN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	MASA BERLAKU
1	2	3	4	5	6	7
			6. Menguasai fasilitas penyimpanan/ full kendaraan yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai kepemilikan/ penguasaan			
			7. Memiliki / bekerja sama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan, sehingga dapat merawat kendaraan untuk tetap beroperasi/ layak jalan			
			8. Surat Keterangan kondisi usaha seperti permodalan dan SDM			
			9. Surat keterangan komitmen usaha seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan Standar pelayanan yang akan diterapkan.			
E.	PERIZINAN DIBIDANG PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN					
1.	IZIN USAHA MENDIRIKAN MESIN PENGGILINGAN					
	PADI (HULLER)	1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 859/Kpts.TP.250/II/08 tentang pedoman Pembinaan Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras	1. Permohonan	tidak ada biaya	7 (tujuh) hari kerja apabila persyaratan lengkap dan benar	Izin berlaku selama perusahaan masih menjalankan usaha
		2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	2. Surat kuasa untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/ pimpinan perusahaan			
		3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2013, tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan	3. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan yang berbadan hukum			
			4. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)			
			5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)			
			6. Pas Foto ukuran 3 x 4, sebanyak 2 (dua) lembar			
			7. Status Tanah			
			8. Pernyataan izin warga sekitar diketahui oleh wali nagari dan camat setempat			
			9. Rekomendasi Dinas Pertanian tentang luas kawasan sawah			
			10. Foto Copy Izin Gangguan			
			11. Foto Copy IMB			
			12. Rekomendasi Instansi terkait bila dipersyaratkan			
2.	IZIN USAHA PABRIK PENGOLAHAN (IUP-P)					
		1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal	1. Permohonan	Tidak ada biaya	14 (empat belas) hari kerja	Izin berlaku selama kegiatan usaha masih dijalankan,
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah.	2. Surat kuasa untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/ pimpinan perusahaan		terhitung mulai pengajuan permohonan dengan syarat dievaluasi setiap tahunnya	dan wajib menyampaikan laporan kepada instansi penerbit izin secara berkala
		3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/ Permentan / PT.140/9/2013, tentang pedoman izin Usaha Perkebunan	3. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan yang berbadan hukum			
		4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011, tentang tata ruang daerah	4. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)			
		5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)			
		6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2013, tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan	6. Status Tanah			
			7. Pernyataan izin warga sekitar diketahui oleh wali nagari dan camat setempat			
			8. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)			
			9. Foto Copy Izin Gangguan			
			10. Foto Copy IMB			
			11. Izin Prinsip Penanaman Modal			
			12. Izin Lokasi			
			13. Jaminan Pasokan bahan baku			
			14. Rencana Kerja Pembangunan Usaha Industri			
			15. Pemanfaatan ruang dari Pemerintah Daerah			
			16. Izin Lingkungan (Amdal, UKL-UPL)			
			17. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan			

NO	JENIS IZIN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	MASA BERLAKU
1	2	3	4	5	6	7
			18. Rekomendasi Instansi teknis terkait bila dipersyaratkan			
	<b>3. IZIN USAHA PERKEBUNAN BUDI DAYA (IUP-B)</b>					
		1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal	1. Permohonan	Tidak ada biaya	14 (empat belas) hari kerja	Izin berlaku selama kegiatan
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah.	2. Surat kuasa untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/ pimpinan perusahaan		terhitung mulai pengajuan	usaha masih dijalankan,
		3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/ Permentan / PT.140/9/2013, tentang pedoman izin Usaha Perkebunan	3. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan yang berbadan hukum		permohonan dengan syarat	dievaluasi setiap tahunnya
		4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011, tentang tata ruang daerah	4. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		bahan-bahan sudah lengkap	dan wajib menyampaikan laporan kepada instansi
		5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)			penerbit izin secara berkala
		6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2013, tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan	6. Status Tanah			
			7. Pernyataan izin warga sekitar diketahui oleh wali nagari dan camat setempat			
			8. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)			
			9. Izin Prinsip Penanaman Modal			
			10. Izin Lokasi			
			11. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila real yang diminta berasal dari kawasan hutan			
			12. Rencana Kerja pembangunan masyarakat sekitar, rencana tempat hasil produksi untuk diolah			
			13. Pemanfaatan ruang dari Pemerintah Daerah			
			14. Izin Lingkungan (Amdal, UKL-UPL)			
			15. Pernyataan kesanggupan :			
			a. Memiliki sumber daya manusia, sarana prasarana dan sistim untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT)			
			b. Memiliki sumber daya manusia, sarana prasarana dan sistim untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran			
			c. Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan			
			d. Melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan			
			16. Rekomendasi Instansi terkait bila dipersyaratkan.			
	<b>4. IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP)</b>					
		1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal	1. Permohonan	Tidak ada biaya	14 (empat belas) hari kerja	Izin berlaku selama kegiatan
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah.	2. Profil Perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di kementrian hukum dan Ham, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan		terhitung mulai pengajuan	usaha masih dijalankan,
		3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/ Permentan / PT.140/9/2013, tentang pedoman izin Usaha Perkebunan	3. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		permohonan dengan syarat	dievaluasi setiap tahunnya
		4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011, tentang tata ruang daerah	4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)		bahan-bahan sudah lengkap	dan wajib menyampaikan laporan kepada instansi
		5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	5. Status Tanah			penerbit izin secara berkala
		6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2013, tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan	6. Pernyataan izin warga sekitar diketahui oleh wali nagari dan camat setempat			
			7. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)			
			8. Izin Prinsip Penanaman Modal			

NO	JENIS IZIN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	MASA BERLAKU
1	2	3	4	5	6	7
			9. Izin Lokasi			
			10. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila real yang diminta berasal dari kawasan hutan			
			11. Rencana Kerja pembangunan masyarakat sekitar, rencana tempat hasil produksi untuk diolah			
			12. Pemanfaatan ruang dari Pemerintah Daerah			
			13. Izin Lingkungan (Amdal, UKL-UPL)			
			14. Pernyataan kesanggupan :			
			a. Memiliki sumber daya manusia, sarana prasarana dan sistim untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT)			
			b. Memiliki sumber daya manusia, sarana prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran			
			c. Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan			
			d. Melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan			
			15. Surat Pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok (grup) perusahaan perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan berlaku			
			16. Rekomendasi Instansi Teknis terkait bila dipersyaratkan.			
	<b>5. IZIN USAHA PETERNAKAN</b>					
		1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, tentang Peternakan dan Kesehatan hewan.	1. Permohonan	Tidak ada biaya	14 (empat belas) hari kerja	Izin berlaku selama kegiatan usaha masih dijalankan,
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal	2. Profil Perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di kementerian hukum dan HAM, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan		terhitung mulai pengajuan permohonan dengan syarat bahan-bahan sudah lengkap	dievaluasi setiap tahunnya dan wajib menyampaikan laporan kepada instansi penerbit izin secara berkala
		3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009, tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal	3. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)			
		4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2004, tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri	4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)			
		5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012, tentang Retribusi Perizinan Tertentu	5. Status Tanah			
		6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2013, tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan	6. Pernyataan izin warga sekitar diketahui oleh wali nagari dan camat setempat			
			7. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)			
			8. Izin Prinsip Penanaman Modal			
			9. Izin Lokasi			
			10. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila real yang diminta berasal dari kawasan hutan			
			11. Rencana Kerja pembangunan masyarakat sekitar, rencana tempat hasil produksi untuk diolah			
			12. Pemanfaatan ruang dari Pemerintah Daerah			
			13. Izin Lingkungan (Amdal, UKL-UPL)			
			14. Rekomendasi Instansi Teknis terkait bila dipersyaratkan.			



NO	JENIS IZIN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	MASA BERLAKU
1	2	3	4	5	6	7
F.	PERIZINAN DIBIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
1.	IZIN USAHA MENDIRIKAN MESIN PEMECAH BATU (STONE CRUSSHER)	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2011, tentang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012, tentang Retribusi Perizinan Tertentu	1. Permohonan 2. Profil Perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di kementerian hukum dan Ham, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan 3. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 5. Status Tanah 6. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 7. Izin Gangguan 8. Izin Mendirikan Bangunan 9. Izin Prinsip Penanaman Modal 10. Rencana Pemenuhan Bahan Baku/ suplai dari perusahaan pemegang izin pertambangan produksi (IUP) 11. Pemanfaatan ruang dari Pemerintah Daerah 12. Izin Lingkungan (Amdal, UKL-UPL) 13. Rekomendasi Instansi Teknis terkait bila dipersyaratkan.	Tidak ada biaya	7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai pengajuan permohonan dengan syarat bahan-bahan sudah lengkap	Izin berlaku selama kegiatan usaha masih dijalankan, dievaluasi setiap tahunnya dan wajib menyampaikan laporan kepada instansi penerbit izin secara berkala
2.	IZIN USAHA MENDIRIKAN ASPHAL MIXING PLANT (AMP)	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2011, tentang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012, tentang Retribusi Perizinan Tertentu 4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2013, tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan	1. Permohonan 2. Profil Perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di kementerian hukum dan Ham, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan 3. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 5. Status Tanah 6. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 7. Izin Gangguan 8. Izin Mendirikan Bangunan 9. Izin Prinsip Penanaman Modal 10. Pemanfaatan ruang dari Pemerintah Daerah 11. Izin Lingkungan (Amdal, UKL-UPL) 12. Rekomendasi Instansi Teknis terkait bila dipersyaratkan.	Tidak ada biaya	7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai pengajuan permohonan dengan syarat bahan-bahan sudah lengkap	Izin berlaku selama kegiatan usaha masih dijalankan, dievaluasi setiap tahunnya dan wajib menyampaikan laporan kepada instansi penerbit izin secara berkala
3.	IZIN USAHA MENDIRIKAN STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR MINYAK UMUM (SPBU)	1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 3. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1454.K/30/Mem/2008 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012, tentang Retribusi Perizinan Tertentu 5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2013, tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan	1. Permohonan 2. Profil Perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di kementerian hukum dan Ham, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan 3. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 5. Pas Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Rekomendasi izin Pertamina 7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Tidak ada biaya	14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai pengajuan permohonan dengan syarat bahan-bahan sudah lengkap	Izin berlaku selama kegiatan usaha masih dijalankan, dievaluasi setiap tahunnya dan wajib menyampaikan laporan kepada instansi penerbit izin secara berkala

NO	JENIS IZIN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	MASA BERLAKU
1	2	3	4	5	6	7
			8. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)			
			9. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)			
			10. Izin Gangguan			
			11. Izin Mendirikan Bangunan			
			12. Bukti Kepemilikan Tanah			
			13. Bukti Pengesahan meter pompa SPBU			
			14. Izin Tangki timbun			
			15. Izin Prinsip Penanaman Modal			
			16. Izin Lokasi			
			17. Peta Lokasi skala 1 : 10.000			
			18. Pemanfaatan ruang dari Pemerintah Daerah			
			19. Izin Lingkungan (Amdal, UKL-UPL)			
			20. Rekomendasi Instansi Teknis terkait bila dipersyaratkan			
4.	IZIN PENUMPUKAN GAS ALAM CAIR/ ELPIJI					
		1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	1. Permohonan	Tidak ada biaya	5 (lima) hari kerja	Izin berlaku selama kegiatan
		2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012, tentang Retribusi Perizinan Tertentu	2. Akte pendirian perusahaan bagi perusahaan berbadan hukum		terhitung mulai pengajuan	usaha masih dijalankan,
		3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2013, tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan	3. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		permohonan dengan syarat	dievaluasi setiap tahunnya
			4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)		bahan-bahan sudah lengkap	dan wajib menyampaikan
			5. Status Tanah			laporan kepada instansi
			6. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)			penerbit izin secara berkala
			7. Izin Gangguan			
			8. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)			
			9. Surat kerjasama / penunjukan dari agen yang telah ditunjuk dari Pertamina sesuai dengan wilayah kerjanya.			
			10. Rekomendasi Instansi Teknis terkait bila dipersyaratkan			
G.	PERIZINAN DIBIDANG PARIWISATA					
1.	IZIN MENDIRIKAN HOTEL					
		1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan	1. Permohonan	Tidak ada biaya	5 (lima) hari kerja	Izin berlaku selama kegiatan
		2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 122 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	2. Profil Perusahaan		terhitung mulai pengajuan	usaha masih dijalankan,
		3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012, tentang Retribusi Perizinan Tertentu	3. Foto Copy Akta Pendirian bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum		permohonan dengan syarat	dievaluasi setiap tahunnya
		4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2013, tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan	4. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		bahan-bahan sudah lengkap	dan wajib menyampaikan
			5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)			laporan kepada instansi
			6. Pas Foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar			penerbit izin secara berkala
			7. Status Tanah			
			8. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)			
			9. Izin Gangguan			
			10. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)			
			11. Izin Prinsip Penanaman Modal			
			12. Izin Lokasi			
			13. Proposal rencana pembangunan hotel			
			14. Pemanfaatan ruang dari Pemerintah Daerah			
			15. Izin Lingkungan (Amdal, UKL-UPL)			
			16. Rekomendasi Instansi Teknis Terkait bila dipersyaratkan			

NO	JENIS IZIN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	MASA BERLAKU
1	2	3	4	5	6	7
2.	IZIN MENDIRIKAN RESTORAN					
		1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan	1. Permohonan	Tidak ada biaya	5 (lima) hari kerja	Izin berlaku selama kegiatan
		2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 122 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	2. Profil Perusahaan		terhitung mulai pengajuan	usaha masih dijalankan,
		3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012, tentang Retribusi Perizinan Tertentu	3. Foto Copy Akta Pendirian bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum		permohonan dengan syarat	dievaluasi setiap tahunnya
		4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2013, tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan	4. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		bahan-bahan sudah lengkap	dan wajib menyampaikan laporan kepada instansi
			5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)			penerbit izin secara berkala
			6. Pas Foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar			
			7. Status Tanah			
			8. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)			
			9. Izin Gangguan			
			10. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)			
			11. Rencana pembangunan restoran			
			12. Izin Lingkungan			
			13. Rekomendasi Instansi Teknis terkait bila dipersyaratkan			
3.	IZIN ATRAKSI WISATA					
		1. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM-96/HK.10/MPPT-87, tentang Ketentuan Usaha Perjalanan	1. Permohonan	Tidak ada biaya	3 (tiga) hari kerja	Izin berlaku selama kegiatan
		Pajak Daerah	2. Profil Perusahaan		terhitung mulai pengajuan	usaha masih dijalankan,
		2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012, tentang Retribusi Perizinan Tertentu	3. Foto Copy Akta Pendirian bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum		permohonan dengan syarat	dievaluasi setiap tahunnya
		3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2013, tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan	4. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		bahan-bahan sudah lengkap	dan wajib menyampaikan laporan kepada instansi
			5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)			penerbit izin secara berkala
			6. Pas Foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar			
			7. Izin Keramaian			
			8. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)			
			9. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)			
			10. Izin Gangguan			
			11. Izin Lingkungan (Amdal, UKL-UPL)			
			12. Rekomendasi Instansi teknis terkait bila dipersyaratkan			
H.	PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN					
1.	IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT					
		1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	1. Permohonan	Tidak ada biaya	14 (empat belas) hari kerja	Izin berlaku selama kegiatan
		2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	2. Profil Perusahaan		terhitung mulai pengajuan	usaha masih dijalankan,
		3. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit	3. Foto Copy Akta Pendirian bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum		permohonan dengan syarat	dievaluasi setiap tahunnya
		4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 147/ Menkes /Per/ I/2010, tentang perizinan Rumah sakit	4. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		bahan-bahan sudah lengkap	dan wajib menyampaikan laporan kepada instansi
		5. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1410/Menkes/SK/X/1993, tentang Penetapan Penggunaan Sistik Informasi Rumah Sakit di Indonesia	5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)			penerbit izin secara berkala
		6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012, tentang Retribusi Perizinan Tertentu	6. Pas Foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar			
		7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2013, tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan	7. Status Tanah			
			8. Study kelayakan rumah sakit			
			9. Master plan			
			10. Rekomendasi izin mendirikan bangunan			
			11. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)			
			12. Izin Gangguan			
			13. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)			
			14. Izin Prinsip Penanaman Modal			
			15. Izin Lokasi			

NO	JENIS IZIN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	MASA BERLAKU
1	2	3	4	5	6	7
			16. Proposal rencana pembangunan rumah sakit			
			17. Pemanfaatan ruang dari Pemerintah Daerah			
			18. Izin Lingkungan (Amdal, UKL-UPL)			
			19. Rekomendasi Instansi teknis terkait bila dipersyaratkan			
2.	IZIN RUMAH SAKIT KHUSUS					
		1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	1. Permohonan	Tidak ada biaya	14 (empat belas) hari kerja	Izin berlaku selama kegiatan
		2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	2. Profil Perusahaan		terhitung mulai pengajuan	usaha masih dijalankan,
		3. Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan	3. Foto Copy Akta Pendirian bagi perusahaan yang berbentuk		permohonan dengan syarat	dievaluasi setiap tahunnya
		4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 920/ Menkes /Per/VII/1986, tentang Upaya	badan hukum		bahan-bahan sudah lengkap	dan wajib menyampaikan
		Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik	4. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)			laporan kepada instansi
		5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1189.A/ Menkes /SK/X/1993, tentang	5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)			penerbit izin secara berkala
		Wewenang Penetapan Izin di Bidang Kesehatan	6. Pas Foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar			
		Penetapan Penggunaan Sistim Informasi Rumah Sakit di Indonesia	7. Status Tanah			
		6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012, tentang	8. Study kelayakan rumah sakit			
		Retribusi Perizinan Tertentu	9. Master plan			
		7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2013, tentang Pendelegasian	10. Rekomendasi izin mendirikan bangunan			
		Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan	11. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)			
		Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan	12. Izin Gangguan			
			13. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)			
			14. Izin Prinsip Penanaman Modal			
			15. Izin Lokasi			
			16. Proposal rencana pembangunan rumah sakit			
			17. Pemanfaatan ruang dari Pemerintah Daerah			
			18. Izin Lingkungan (Amdal, UKL-UPL)			
			19. Rekomendasi Instansi teknis terkait bila dipersyaratkan			
3.	IZIN USAHA MENDIRIKAN OPTIKAL					
		1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/Menkes/SK/XI/2002 tentang	1. Permohonan	Tidak ada biaya	5 (lima) hari kerja	Izin berlaku selama kegiatan
		Pedoman Penyelenggaraan Optikal	2. Profil Perusahaan		terhitung mulai pengajuan	usaha masih dijalankan,
		2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 572/Menkes/SK/VI/2008, tentang	3. Foto Copy Akta Pendirian optikal bagi perusahaan yang berbentuk		permohonan dengan syarat	dievaluasi setiap tahunnya
		Standar Profesi Refraksionis Optisien	badan hukum		bahan-bahan sudah lengkap	dan wajib menyampaikan
		3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012, tentang	4. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)			laporan kepada instansi
		Retribusi Perizinan Tertentu	5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)			penerbit izin secara berkala
		4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2013, tentang Pendelegasian	6. Pas Foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar			
		Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan	7. Status Tanah			
		Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan	8. Surat Pernyataan kesediaan refraksionis optisien untuk menjadi			
			penanggung jawab pada optikal/ laboratorium optik yang akan			
			didirikan dengan melampirkan :			
			a. Surat Perjanjian pemilik sarana dengan refraksionis optisien.			
			b. Surat keterangan dari pejabat setempat menyatakan bahwa			
			refraksionis optisien calon penanggung jawab bertempat tinggal/			
			domisili di daerah tersebut.			
			c. Foto Copy ijazah refraksionis optisien yang telah dilegalisir			
			d. Surat keterangan sehat dari dokter			
			e. Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar			
			9. Surat pernyataan kerja sama dari laboratorium optik tempat			
			pemrosesan lensa-lensa pesanan, bila optikal tidak memiliki			
			laboratorium sendiri.			

NO	JENIS IZIN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	MASA BERLAKU
1	2	3	4	5	6	7
			10. daftar sarana dan peralatan yang akan digunakan			
			11. Daftar pegawai serta tugas dan fungsinya			
			12. Surat keterangan dari organisasi/ asosiasi setempat yang menyatakan bahwa refraksionis optisien yang diajukan hanya menjadi penanggung jawab dari optikal yang mengajukan izin			
			tersebut, dan diketahui oleh organisasi pengusaha optikal setempat			
			13. Surat izin Tempat Usaha (SITU)			
			14. Izin gangguan			
			15. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)			
			16. Peta Lokasi			
			17. Denah Ruang dengan skala 1 : 100			
			18. Rekomendasi Instansi teknis terkait bila dipersyaratkan			
4.	IZIN USAHA MENDIRIKAN APOTIK					
		1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika	1. Permohonan	Tidak ada biaya	5 (lima) hari kerja	Izin berlaku selama kegiatan
		2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	2. Profil Perusahaan		terhitung mulai pengajuan	usaha masih dijalankan,
		3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	3. Foto Copy Akta Pendirian apotik bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum		permohonan dengan syarat dievaluasi setiap tahunnya	
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, tentang Tenaga Kesehatan			bahan-bahan sudah lengkap	dan wajib menyampaikan
		5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Kab/B.VIII/1972 tentang pedagang eceran obat, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang perubahan atas Peraturan Menteri kesehatan nomor 67/Kab/B.VIII/1972 tentang Pedagang eceran obat.	4. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)			laporan kepada instansi
		6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/ Menkes/PER/XII/1986, tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di bidang medik	5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)			penerbit izin secara berkala
		7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012, tentang Retribusi Perizinan Tertentu	6. Pas Foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar			
		8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2013, tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan	7. Materai Rp. 6000,- sebanyak 2 lembar			
			8. Surat izin Tempat Usaha (SITU)			
			9. Izin gangguan			
			10. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)			
			11. Foto Copy Surat Penugasan (SP) Apoteker			
			12. Foto Copy Ijazah Apoteker			
			13. Denah Ruang/ bangunan Apotik			
			14. Daftar Asisten Apoteker (mencantumkan nama, tanggal lulus serta melampirkan surat izin asisten apoteker			
			15. Salinan Foto Copy Ijazah Apoteker			
			16. Surat pernyataan APA (yang menyatakan bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan formasi lain dan tidak menjadi APA di Apotik lain)			
			17. Akta Perjanjian kerjasama Apoteker pengelola Apotik dengan pemilik sarana Apotik			
			18. Rekomendasi ISFI (Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia) Sumbang			
			19. Rekomendasi Instansi teknis terkait bila dipersyaratkan.			
5.	IZIN TOKO OBAT					
		1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika	1. Permohonan	Tidak ada biaya	5 (lima) hari kerja	Izin berlaku selama kegiatan
		2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	2. Foto Copy Akta Pendirian bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum		terhitung mulai pengajuan	usaha masih dijalankan,
		3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan			permohonan dengan syarat dievaluasi setiap tahunnya	
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, tentang Tenaga Kesehatan	3. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		bahan-bahan sudah lengkap	dan wajib menyampaikan
		5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Kab/B.VIII/1972 tentang pedagang eceran obat, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang perubahan atas Peraturan Menteri kesehatan nomor 67/Kab/B.VIII/1972 tentang Pedagang eceran obat.	4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)			laporan kepada instansi
			5. Pas Foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar			penerbit izin secara berkala
			6. Materai Rp. 6000,- sebanyak 2 lembar			
			7. Surat izin Tempat Usaha (SITU)			

NO	JENIS IZIN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	MASA BERLAKU
1	2	3	4	5	6	7
		6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/ Menkes/PER/XII/1986, tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di bidang medik	8. Izin gangguan			
		7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012, tentang Retribusi Perizinan Tertentu	9. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)			
		8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2013, tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan	10. Surat Pernyataan bersedia menjadi penanggung jawab toko obat dari asisten apoteker			
			11. Foto Copy Ijazah Apoteker			
			12. Denah Lokasi			
			13. Rekomendasi Instansi teknis terkait bila dipersyaratkan.			
6.	IZIN MENDIRIKAN DEPOT ISI ULANG AIR MINUM					
		1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan	1. Permohonan	Tidak ada biaya	5 (lima) hari kerja	Izin berlaku selama kegiatan
		2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 416/Menkes/Per/IX/1990, tentang Kualitas Air Bersih	2. Foto Copy Akta Pendirian bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum		terhitung mulai pengajuan permohonan dengan syarat	usaha masih dijalankan, dievaluasi setiap tahunnya
		3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010, tentang Persyaratan Kualitas Air Minum	3. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		bahan-bahan sudah lengkap	dan wajib menyampaikan laporan kepada instansi penerbit izin secara berkala
		4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 651/MPP/KBP/10/2004, tentang persyaratan Depot Air minum dan perdagangannya.	4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)			
		5. Keputusan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Nomor : 02987/B/SK/VII/90, tentang pendaftaran bahan makanan tertentu.	5. Materai Rp. 6000,- sebanyak 2 lembar			
		6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012, tentang Retribusi Perizinan Tertentu	6. Surat izin Tempat Usaha (SITU)			
		7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2013, tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan	7. Izin gangguan			
			8. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)			
			9. Tanda Daftar Industri (TDI)			
			10. Hasil laboratorium air minum dari instansi terkait			
			11. Rekomendasi Instansi teknis terkait bila dipersyaratkan.			
7.	IZIN AIR MINUM DALAM KEMASAN					
		1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan	1. Permohonan	Tidak ada biaya	5 (lima) hari kerja	Izin berlaku selama kegiatan
		2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 416/Menkes/Per/IX/1990, tentang Kualitas Air Bersih	2. Profil Perusahaan		terhitung mulai pengajuan permohonan dengan syarat	usaha masih dijalankan, dievaluasi setiap tahunnya
		3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010, tentang Persyaratan Kualitas Air Minum	3. Foto Copy Akta Pendirian bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum		bahan-bahan sudah lengkap	dan wajib menyampaikan laporan kepada instansi penerbit izin secara berkala
		4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 651/MPP/KBP/10/2004, tentang persyaratan Depot Air minum dan perdagangannya.	4. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)			
		5. Keputusan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Nomor : 02987/B/SK/VII/90, tentang pendaftaran bahan makanan tertentu.	5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)			
		6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012, tentang Retribusi Perizinan Tertentu	6. Materai Rp. 6000,- sebanyak 2 lembar			
		7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2013, tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan	7. Izin Prinsip Penanaman Modal			
			8. Surat izin Tempat Usaha (SITU)			
			9. Izin gangguan			
			10. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)			
			11. Izin Industri (IUI/TDI)			
			12. SNI dari instansi terkait			
			13. Hasil laboratorium Air minum dari instansi terkait			
			14. Izin pengambilan air permukaan/ air bawah tanah			
			15. Izin Lingkungan (Amdal, UKL-UPL)			
			16. Surat Jaminan pemasokan air baku dari PDAM/ perusahaan yang memiliki izin pengambilan air dari instansi yang berwenang			
			17. Rekomendasi Instansi teknis terkait bila dipersyaratkan.			
8.	IZIN USAHA PRODUKSI MAKANAN DAN MINUMAN					
		1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010, tentang Persyaratan Kualitas Air Minum	1. Permohonan	Tidak ada biaya	5 (lima) hari kerja	Izin berlaku selama kegiatan
			2. Profil Perusahaan		terhitung mulai pengajuan permohonan dengan syarat	usaha masih dijalankan, dievaluasi setiap tahunnya

[illegible]

NO	JENIS IZIN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	MASA BERLAKU
1	2	3	4	5	6	7
I.	PERIZINAN DIBIDANG TATA PEMERINTAHAN					
1.	IZIN GANGGUAN (HO)					
		1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009, tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah	1. Permohonan	Terlampir	15 (lima belas) hari kerja	Izin berlaku selama usaha
		2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012, tentang Retribusi Perizinan Tertentu	2. Profil Perusahaan		terhitung mulai pengajuan	dijalankan, dan melakukan
		3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2013, tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan	3. Foto Copy Akta pendirian bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum		permohonan dengan syarat	pendaftaran ulang setiap
			4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)		bahan-bahan sudah lengkap	3 (tiga) tahun dan wajib
			5. Pas Foto ukuran 3 x 4, sebanyak 2 lembar			dikenakan retribusi sesuai
			6. Surat Pernyataan status tanah, diketahui camat setempat			dengan ketentuan yang
			7. Rekomendasi Camat Setempat			berlaku
			8. Berita acara pemeriksaan lapangan			
			9. Denah lokasi tempat usaha			
			10. Surat pernyataan pencegahan dan pencemaran lingkungan			
			11. Surat pernyataan persetujuan tetangga/ lingkungan			
			12. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)			
			13. Izin Lingkungan (Amdal, UKL-UPL), bagi yang dipersyaratkan			
			14. Rekomendasi Instansi teknis terkait bila dipersyaratkan.			
J.	NON PERIZINAN DI BIDANG KESATUAN BANGSA					
	DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
	IZIN PENELITIAN/ SURVEY	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011, tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian	Warga Negara Indonesia (WNI) :	Tidak ada biaya	Lama proses pengurusan	Izin berlaku selama kegiatan
		2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2013, tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan	1. Permohonan tertulis dari badan/ perguruan tinggi/ Instansi/ Sekolah		izin adalah 3 (tiga) hari kerja	penelitian/ survey.
			2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Mahasiswa			
			3. Rincian waktu penelitian			
			4. Proposal Penelitian (Bab I sampai dengan Bab III)			



## **A. PERIZINAN DIBIDANG PENANAMAN MODAL**

### **1. IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL**

#### **PERSYARATAN**

1. Permohonan 2. Surat kuasa bagi pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh diirektur/pimpinan perusahaan 3. Foto Copy Akte Perusahaan 4. Profil perusahaan 5. Foto Copy akte pendirian perusahaan 6. Foto Copy Akta perubahan perusahaan ( bila ada ) 7. Surat Keterangan domisili Perusahaan 8. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 9. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Direktur 10. Bukti penguasaan atas tanah 11. Proposal dan presentasi rencana Investasi. 12. Pemanfaatan Tata Ruang Daerah. 13. Rekomendasi Instansi teknis terkait bila dipersyaratkan.

#### **BIAYA**

Tidak ada biaya

#### **WAKTU**

3 (tiga) hari kerja apabila persyaratan lengkap dan benar

### **2. IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL**

#### **PERSYARATAN**

1. Permohonan 2. Surat kuasa bagi pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh diirektur/pimpinan perusahaan 3. Foto Copy Akte Perusahaan 4. Izin Prinsip Penanaman Modal 5. Rencana Detail Perusahaan 6. Bukti penguasaan atas tanah 7. Proposal dan presentasi rencana Investasi. 8. Pemanfaatan Tata Ruang Daerah. 9. Laporan Kegiatan Penanaman Modal 10. Rekomendasi Instansi teknis terkait bila dipersyaratkan.

#### **BIAYA**

Tidak ada biaya

#### **WAKTU**

5 (lima) hari kerja apabila persyaratan lengkap dan benar

### **3. IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL**

#### **PERSYARATAN**

1. Permohonan 2. Surat kuasa bagi pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh diirektur/pimpinan perusahaan 3. Foto Copy Izin Prinsip Penanaman Modal 4. Foto Copy Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal (bila ada) 5. Foto Copy Rencana Perubahan Penanaman Modal 6. Proposal dan presentasi rencana Investasi. 7. Pemanfaatan Tata Ruang Daerah. 8. Laporan Kegiatan Penanaman Modal 9. Rekomendasi Instansi teknis terkait bila dipersyaratkan.

#### **BIAYA**

Tidak ada biaya

#### **WAKTU**

7 (tujuh) hari kerja apabila persyaratan lengkap dan benar

### **4. IZIN USAHA PENANAMAN MODAL**

#### **PERSYARATAN**

1. Permohonan 2. Surat kuasa bagi pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh diirektur/pimpinan perusahaan 3. Profil Perusahaan 4. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan 5. Foto Copy Akta Perubahan Perusahaan (bila ada) 6. Surat Keterangan Domisili Perusahaan 7. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 8. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Direktur 9. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 10. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 11. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 12. Foto Copy Izin Prinsip Penanaman Modal 13. Laporan Kegiatan Penanaman Modal 14. Bukti Penguasaan atas Tanah 15. Izin Gangguan 16. Izin Mendirikan Bangunan IMB, (bagi yang memiliki bangunan) 17. Proposal dan Presentasi Rencana Investasi 18. Pemanfaatan Tata Ruang Daerah 19. Izin Lingkungan (Amdal, UPL-UKL) 20. Rekomendasi Instansi teknis terkait bila dipersyaratkan.

#### **BIAYA**

Tidak ada biaya

#### **WAKTU**

5 (lima) hari kerja apabila persyaratan lengkap dan benar

## **5. IZIN USAHA PERLUASAN PENANAMAN MODAL**

### **PERSYARATAN**

1. Permohonan 2. Surat kuasa bagi pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh diirektur/pimpinan perusahaan 3. Profil Perusahaan 4. Rencana Perluasan Penanaman Modal 5. Foto Copy Izin Usaha Penanaman Modal 6. Laporan Kegiatan Penanaman Modal tahun terakhir 7. Bukti Penguasaan atas Tanah 8. Izin Gangguan 9. Izin Mendirikan Bangunan IMB, (bagi yang memiliki bangunan) 10. Proposal dan Presentasi Rencana Perluasan Investasi 11. Pemanfaatan Tata Ruang Daerah 12. Izin Lingkungan (Amdal, UPL-UKL) 13. Rekomendasi Instansi teknis terkait bila dipersyaratkan.

### **BIAYA**

Tidak ada biaya

### **WAKTU**

7 (tujuh) hari kerja apabila persyaratan lengkap dan benar

## **6. IZIN USAHA PERUBAHAN PENANAMAN MODAL**

### **PERSYARATAN**

1. Permohonan 2. Surat kuasa bagi pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh diirektur/pimpinan perusahaan 3. Foto Copy Akte Perusahaan 4. Izin Prinsip Penanaman Modal 5. Rencana Detail Perusahaan 6. Bukti penguasaan atas tanah 7. Proposal dan presentasi rencana Investasi. 8. Pemanfaatan Tata Ruang Daerah. 9. Laporan Kegiatan Penanaman Modal 10. Rekomendasi Instansi teknis terkait bila dipersyaratkan.

### **BIAYA**

Tidak ada biaya

### **WAKTU**

7 (tujuh) hari kerja apabila persyaratan lengkap dan benar

## **7. IZIN USAHA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL (MERGER)**

### **PERSYARATAN**

1. Permohonan 2. Surat kuasa bagi pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh diirektur/pimpinan perusahaan 3. Profil Perusahaan 4. Foto Copy Izin Prinsip/ Perubahan Penanaman Modal 5. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan 6. Foto Copy NPWP Perusahaan 7. Kesepakatan Penggabungan Perusahaan yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan perubahan kepemilikan saham dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk risalah rapat umum pemegang saham (RUPS/Keputusan sirkuler seluruh pemegang saham/ akta perubahan dalam bentuk keputusan / Akta Perubahan dalam bentuk keputusan rapat/ berita acara. 8. Laporan Kegiatan Penanaman Modal tahun terakhir 9. Legalitas Pekerjaan 10. Bukti Penguasaan atas Tanah 11. Izin Gangguan 12. Izin Mendirikan Bangunan IMB, (bagi yang memiliki bangunan) 13. Proposal dan Presentasi Rencana Penggabungan perusahaan penanaman modal 11. Pemanfaatan Tata Ruang Daerah 12. Izin Lingkungan (Amdal, UPL-UKL) 13. Rekomendasi Instansi teknis terkait bila dipersyaratkan.

### **BIAYA**

Tidak ada biaya

### **WAKTU**

14 (empat belas) hari kerja apabila persyaratan lengkap dan benar

## **B. PERIZINAN DIBIDANG PEKERJAAN UMUM**

### **8. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

#### **1. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (FUNGSI USAHA, GANDA/ CAMPURAN, KHUSUS, KEAGAMAAN, SOSIAL DAN BUDAYA)**

##### **PERSYARATAN**

1. Permohonan 2. Foto Akta Pendirian Perusahaan bagi Perusahaan yang berbadan hukum 3. Bukti Kepemilikan Tanah 4. Surat Persetujuan Tetangga/lingkungan diketahui oleh Wali Nagari setempat 5. Berita Acara Komisi Kecamatan 6. Denah Lokasi Rencana Pembangunan 7. Rekomendasi Camat 8. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk 9. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm berwarna, sebanyak 2 (dua) lembar 10. Izin Prinsip Penanaman Modal (bagi yang dipersyaratkan) 11. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bangunan 12. Pemanfaatan Tata Ruang Daerah. 13. Foto Copy Izin Lingkungan (Amdal, UKL-UPL), apabila dipersyaratkan. 14. Rekomendasi Instansi teknis terkait apabila dipersyaratkan

##### **BIAYA**

Terlampir

##### **WAKTU**

5 (lima) hari kerja apabila persyaratan lengkap dan benar

#### **2. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (FUNGSI KEAGAMAAN)**

##### **PERSYARATAN**

1. Permohonan 2. Bukti kepemilikan Tanah 3. Surat Persetujuan Tetangga/lingkungan diketahui oleh wali nagari setempat 4. Berita Acara Komisi Kecamatan 5. Denah Lokasi Rencana Pembangunan 6. Rekomendasi Camat 7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk 8. Foto Copy Persetujuan Rumah Ibadah Terdekat 9. Foto Copy Kartu Penduduk Ketua Rumah Ibadah 10. Foto Copy Susunan Pengurus 11. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm berwarna, sebanyak 2 (dua) lembar 12. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bangunan 13. Rekomendasi instansi teknis terkait apabila dipersyaratkan 14. Foto Copy Izin Lingkungan apabila dipersyaratkan

##### **BIAYA**

Tidak ada biaya

##### **WAKTU**

5 (lima) hari kerja apabila persyaratan lengkap dan benar

#### **3. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (FUNGSI KHUSUS)**

##### **PERSYARATAN**

1. Permohonan 2. Bukti kepemilikan Tanah 3. Surat Persetujuan Tetangga/lingkungan diketahui oleh wali nagari setempat 4. Berita Acara Komisi Kecamatan 5. Denah Lokasi Rencana Pembangunan 6. Rekomendasi Camat 7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk 8. Foto Copy Akta Notaris 9. Foto Copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian hukum dan Hak Azazi Manusia bagi Perseroan Terbatas 10. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (nomor 7,8 dan 9 bagi perusahaan yang berbadan hukum) 11. Izin Prinsip Penanaman Modal (bagi yang dipersyaratkan) 12. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm berwarna, sebanyak 2 (dua) lembar 13. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bangunan 14. Pemanfaatan Tata Ruang Daerah 15. Rekomendasi instansi teknis terkait apabila dipersyaratkan 16. Foto Copy Izin Lingkungan apabila dipersyaratkan

##### **BIAYA**

Terlampir

##### **WAKTU**

5 (lima) hari kerja apabila persyaratan lengkap dan benar

#### **4. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN FUNGSI GANDA/ CAMPURAN**

##### **PERSYARATAN**

1. Permohonan 2. Bukti kepemilikan Tanah 3. Surat Persetujuan Tetangga/lingkungan diketahui oleh wali nagari setempat 4. Berita Acara Komisi Kecamatan 5. Denah Lokasi Rencana Pembangunan 6. Rekomendasi Camat 7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk 8. Foto Copy Akta Notaris 9. Foto Copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian hukum dan Hak Azasi Manusia bagi Perseroan Terbatas 10. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (nomor 7,8 dan 9 bagi perusahaan yang berbadan hukum) 11. Izin Prinsip Penanaman Modal (bagi yang dipersyaratkan) 12. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm berwarna, sebanyak 2 (dua) lembar 13. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bangunan 14. Pemanfaatan Tata Ruang Daerah 15. Rekomendasi instansi teknis terkait apabila dipersyaratkan 16. Foto Copy Izin Lingkungan apabila dipersyaratkan

##### **BIAYA**

Terlampir

##### **WAKTU**

5 (lima) hari kerja apabila persyaratan lengkap dan benar

#### **5. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN FUNGSI SOSIAL BUDAYA**

##### **PERSYARATAN**

1. Permohonan 2. Bukti kepemilikan Tanah 3. Surat Persetujuan Tetangga/lingkungan diketahui oleh wali nagari setempat 4. Berita Acara Komisi Kecamatan 5. Denah Lokasi Rencana Pembangunan 6. Rekomendasi Camat 7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk 8. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm berwarna, sebanyak 2 (dua) lembar 9. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bangunan 10. Pemanfaatan Tata Ruang Daerah 11. Rekomendasi instansi teknis terkait apabila dipersyaratkan 12. Foto Copy Izin Lingkungan apabila dipersyaratkan

##### **BIAYA**

Tidak ada biaya

##### **WAKTU**

5 (lima) hari kerja apabila persyaratan lengkap dan benar

#### **6. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (FUNGSI KHUSUS)**

##### **PERSYARATAN**

1. Permohonan 2. Bukti kepemilikan Tanah 3. Surat Persetujuan Tetangga/lingkungan diketahui oleh wali nagari setempat 4. Berita Acara Komisi Kecamatan 5. Denah Lokasi Rencana Pembangunan 6. Rekomendasi Camat 7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk 8. Foto Copy Akta Notaris 9. Foto Copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian hukum dan Hak Azasi Manusia bagi Perseroan Terbatas 10. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (nomor 7,8 dan 9 bagi perusahaan yang berbadan hukum) 11. Izin Prinsip Penanaman Modal (bagi yang dipersyaratkan) 12. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm berwarna, sebanyak 2 (dua) lembar 13. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bangunan 14. Pemanfaatan Tata Ruang Daerah 15. Rekomendasi instansi teknis terkait apabila dipersyaratkan 16. Foto Copy Izin Lingkungan apabila dipersyaratkan

##### **BIAYA**

Terlampir

##### **WAKTU**

5 (lima) hari kerja apabila persyaratan lengkap dan benar

## **9. SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (SIUJK)**

### **PERSYARATAN**

1. Permohonan 2. Foto Copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan 3. Foto Copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian hukum dan Hak Azazi Manusia bagi Perseroan Terbatas 4. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 5. Foto kartu Tanda Penduduk (KTP) 6. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 7. Kartu Tanda Anggota (KTA) Pelayanan Jasa Konstruksi 8. Foto Copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) 9. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm berwarna, sebanyak 2 (dua) lembar 10. SKK (Sertifikat Keterampilan Kerja) 11. Rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan.

### **BIAYA**

Tidak ada biaya

### **WAKTU**

1 (satu) hari kerja apabila persyaratan lengkap dan benar.

## **10. IZIN PEMASANGAN REKLAME**

### **PERSYARATAN**

1. Permohonan 2. Foto Copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan 3. Foto Copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian hukum dan Hak Azazi Manusia bagi Perseroan Terbatas (nomor 1 dan 2 apabila perusahaan berbadan hukum) 4. Foto Copy perjanjian/ sewa menyewa tanah apabila tanah atau bangunan yang digunakan milik orang lain 5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 6. Foto Copy Teks Reklame 7. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm berwarna, sebanyak 2 (dua) lembar 8. Foto Copy SITU 9. Foto Copy IMB bagi yang dipersyaratkan 10. Rekomendasi dari Instansi Teknis terkait.

### **BIAYA**

Tidak ada biaya

### **WAKTU**

3 (tiga) hari kerja apabila persyaratan lengkap dan benar

## **11. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**

### **1. SIUP BARU**

a. Perusahaan Berbentuk Perseroan Terbatas (PT)

### **PERSYARATAN**

1. Permohonan 2. Surat kuasa bagi pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh diirektur/pimpinan Perusahaan 3. Foto Copy Akta Notaris Pendiri Perusahaan 4. Foto copy akta perubahan perusahaan (bila ada) 5. Foto Copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan terbatas dari Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia. 6. Foto Copy Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab atau Direktur Utama Perusahaan. 7. Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP Tentang Lokasi Perusahaan 8. Pas Photo Penanggung jawab atau Direktur Utama Perusahaan ukuran 3 x 4, sebanyak 2 (dua) lbr. 9. Materai Rp. 6.000 2 (dua) lbr 10. Rekomendasi Instansi Teknis bila dipersyaratkan.

### **BIAYA**

Tidak dikenakan biaya/gratis

### **WAKTU**

Dua hari sepanjang persyaratan lengkap

#### **b. Perusahaan Berbentuk Koperasi**

1. Permohonan, 2. Surat kuasa bagi pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh diirektur/pimpinan perusahaan 3. Foto copy Akta Notaris Pendirian Koperasi yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang. 4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Penanggung jawab atau pengurus Koperasi. 5. Foto Copy Struktur Organisasi Koperasi diketahui Dinas Teknis 6. Surat Pernyataan dari pemohon tentang lokasi usaha Koperasi 7. Pas Photo penanggung Jawab atau pengurus Koperasi Ukuran 3 x 4 , sebanyak 2 (dua) Lembar. 8. Materai Rp. 6.000,- 2 (dua) lbr 9. Rekomendasi Instansi Teknis bila dipersyaratkan.

##### **BIAYA**

Tidak ada biaya

##### **WAKTU**

Dua hari sepanjang persyaratan lengkap

#### **c. Perusahaan yang Berbentuk CV dan Firma**

##### **PERSYARATAN**

1. Permohonan, 2. Surat kuasa bagi pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh diirektur/pimpinan perusahaan Perusahaan 3. Foto Copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan atau Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri. 4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk pemilik atau pengurus atau Penanggung Jawab Perusahaan. 5. Surat Pernyataan dari pemohon tentang lokasi usaha Koperasi 6. Pas Photo pemilik atau pengurus atau penanggung jawab Perusahaan ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lbr 7. Materai Rp. 6.000 2 (dua) lbr 8. Rekomendasi Instansi Teknis bila dipersyaratkan.

##### **BIAYA**

Tidak ada biaya

##### **WAKTU**

Dua hari sepanjang persyaratan lengkap

#### **d. Perusahaan yang Berbentuk Perorangan**

##### **PERSYARATAN**

1. Permohonan, ditandatangani diatas materai cukup oleh direktur/ pemimpin perusahaan, atau Surat Kuasa untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara Langsung oleh direksi /pimpinan perusahaan. 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemilik atau penanggung Jawab Perusahaan. 3. Surat Pernyataan dari Pemohon tentang lokasi usaha koperasi 4. Pas Photo pemilik atau penanggung jawab perusahaan ukuran 3 x 4 , sebanyak 2 (dua) lembar 5. Materai Rp. 6.000 2 (dua) lbr 6. Rekomendasi Instansi Teknis bila dipersyaratkan.

##### **BIAYA**

Tidak dikenakan biaya/gratis

##### **WAKTU**

Dua hari sepanjang persyaratan lengkap

#### **b. Perusahaan Berbentuk Koperasi**

1. Permohonan, 2. Surat kuasa bagi pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh diirektur/pimpinan perusahaan 3. Foto copy Akta Notaris Pendirian Koperasi yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang. 4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Penanggung jawab atau pengurus Koperasi. 5. Foto Copy Struktur Organisasi Koperasi diketahui Dinas Teknis 6. Surat Pernyataan dari pemohon tentang lokasi usaha Koperasi 7. Pas Photo penanggung Jawab atau pengurus Koperasi Ukuran 3 x 4 , sebanyak 2 (dua) Lembar. 8. Materai Rp. 6.000,- 2 (dua) lbr 9. Rekomendasi Instansi Teknis bila dipersyaratkan.

##### **BIAYA**

Tidak ada biaya

##### **WAKTU**

Dua hari sepanjang persyaratan lengkap

#### **c. Perusahaan yang Berbentuk CV dan Firma**

##### **PERSYARATAN**

1. Permohonan, 2. Surat kuasa bagi pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh diirektur/pimpinan perusahaan Perusahaan 3. Foto Copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan atau Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri. 4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk pemilik atau pengurus atau Penanggung Jawab Perusahaan. 5. Surat Pernyataan dari pemohon tentang lokasi usaha Koperasi 6. Pas Photo pemilik atau pengurus atau penanggung jawab Perusahaan ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lbr 7. Materai Rp. 6.000 2 (dua) lbr 8. Rekomendasi Instansi Teknis bila dipersyaratkan.

##### **BIAYA**

Tidak ada biaya

##### **WAKTU**

Dua hari sepanjang persyaratan lengkap

#### **d. Perusahaan yang Berbentuk Perorangan**

##### **PERSYARATAN**

1. Permohonan, ditandatangani diatas materai cukup oleh direktur/ pemimpin perusahaan, atau Surat Kuasa untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara Langsung oleh direksi /pimpinan perusahaan. 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemilik atau penanggung Jawab Perusahaan. 3. Surat Pernyataan dari Pemohon tentang lokasi usaha koperasi 4. Pas Photo pemilik atau penanggung jawab perusahaan ukuran 3 x 4 , sebanyak 2 (dua) lembar 5. Materai Rp. 6.000 2 (dua) lbr 6. Rekomendasi Instansi Teknis bila dipersyaratkan.

##### **BIAYA**

Tidak dikenakan biaya/gratis

##### **WAKTU**

Dua hari sepanjang persyaratan lengkap

## **2. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) PENDAFTARAN ULANG**

1. Permohonan, 2. Surat Kuasa untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direktur/Pimpinan Perusahaan 3. Surat Izin Usaha Perdagangan yang Asli. 4. Neraca Perusahaan (Tahun terakhir khusus untuk perseroan Terbatas) 5. Surat pernyataan dari pemohon tentang lokasi usaha Perusahaan 6. Pas Photo penanggung jawab atau pemilik perusahaan ukuran 3 x 4, sebanyak 2 (dua) lembar 7. Materai Rp. 6.000 2 (dua) lbr 8. Rekomendasi Instansi Teknis terkait

### **BIAYA**

Tidak ada biaya

### **WAKTU**

Dua hari sepanjang persyaratan lengkap

## **3. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) PEMBUKAAN KANTOR CABANG/PERWAKILAN**

### **PERSYARATAN**

1. Permohonan, 2. Surat Kuasa untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direktur/Pimpinan Perusahaan 3. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan Kantor Pusat Perusahaan yang telah dilegalisir oleh Pejabat Penerbit Surat Izin Usaha Perdagangan. 4. Foto Copy Dokumen pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan. 5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dan surat penunjukan sebagai penanggung jawab Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan. 6. Surat Pernyataan dari pemohon tentang lokasi usaha kantor cabang/perwakilan perusahaan. 7. Materai Rp. 6.000 2 (dua) lbr 8. Rekomendasi Instansi Teknis terkait bila dipersyaratkan.

### **BIAYA**

Tidak ada biaya

### **WAKTU**

Dua hari sepanjang persyaratan lengkap

## **4. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) PERUBAHAN**

### **PERSYARATAN**

1. Permohonan, 2. Surat Kuasa untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direktur/pimpinan perusahaan 3. Surat Izin Usaha Perdagangan asli. 4. Neraca Perusahaan (Tahun terakhir khusus untuk perseroan terbatas) 5. Data Pendukung Perubahan. 6. Pas Photo pemilik atau penanggung jawab perusahaan ukuran 3 x 4, sebanyak 2 (dua) lembar 7. Materai Rp. 6.000 2 (dua) lbr 8. Rekomendasi Instalasi teknis terkait bila dipersyaratkan.

### **BIAYA**

Tidak dikenakan biaya/gratis

### **WAKTU**

Dua hari sepanjang persyaratan lengkap



## **5. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) PENGANTIAN**

### **A. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) Yang Hilang**

1. Permohonan, 2. Surat kuasa untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direktur/pimpinan perusahaan. 3. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian. 4. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan lama. 5. Pas photo pemilik atau penanggung jawab perusahaan ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lbr 6. Materai Rp. 6.000 2 (dua) lbr 7. Rekomendasi Instansi terkait bila dipersyaratkan.

#### **BIAYA**

Tidak ada biaya

#### **WAKTU**

Dua hari sepanjang persyaratan lengkap

### **B. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) Yang Rusak**

#### **PERSYARATAN**

1. Permohonan, 2. Surat kuasa untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direktur /pimpinan perusahaan. 3. Surat Izin Usaha Perdagangan lama. 4. Pas photo pemilik atau penanggung jawab perusahaan ukuran 3 x 4, sebanyak 2 (dua) lembar 5. Materai Rp. 6.000 2 (dua) lbr 6. Rekomendasi Instansi Teknis bila dipersyaratkan.

#### **BIAYA**

Tidak ada biaya

#### **WAKTU**

Dua hari sepanjang persyaratan lengkap

## **12. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)**

### **1. TDP Baru**

#### **a. Perusahaan Berbentuk Perseroan Terbatas (PT)**

#### **PERSYARATAN**

1. Permohonan, 2. Foto Copy Izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. 3. Surat kuasa untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direktur/pimpinan perusahaan. 4. Foto copy Akta notaris pendirian perusahaan. 5. Foto copy surat keputusan pengesahan badan hukum perseroan terbatas dari kementerian hukum dan Ham 6. Foto Copy Akta Pendirian Perseroan (Bila ada) 7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab atau Direktur Utama Perusahaan. 8. Foto Copy NPWP 9. Materai Rp. 6.000 1 (Satu) lbr 10. Rekomendasi Instansi Teknis terkait, bila dipersyaratkan 1. Permohonan, 2. Foto copy Izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. 3. Surat Kuasa untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direktur/pimpinan Perusahaan 4. Foto copy akta pendirian Koperasi. 5. Foto copy surat pengesahan badan hukum dari pejabat yang Berwenang. 6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua Koperasi 7. Materai Rp. 6.000,- 1 (satu) lbr 8. Rekomendasi instansi teknis terkait, bila dipersyaratkan

#### **BIAYA**

Tidak dikenakan biaya/gratis

#### **WAKTU**

3 (tiga) hari kerja apabila persyaratan lengkap dan benar.

**b. Perusahaan Berbentuk Koperasi**

1. Permohonan, 2. Foto copy Izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. 3. Surat Kuasa untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direktur/pimpinan Perusahaan 4. Foto copy akta pendirian Koperasi. 5. Foto copy surat pengesahan badan hukum dari pejabat yang Berwenang. 6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua Koperasi 7. Materai Rp. 6.000,- 1 (satu) lbr 8. Rekomendasi instansi teknis terkait, bila dipersyaratkan

**BIAYA**

Tidak ada biaya

**WAKTU**

3 (tiga) hari kerja apabila persyaratan lengkap dan benar.

**c. Perusahaan yang Berbentuk CV****PERSYARATAN**

1. Permohonan, 2. Foto Copy Izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang. 3. Surat kuasa untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direktur/pimpinan Perusahaan. 4. Foto copy akta notaris pendirian perusahaan yang telah didaftarkan pada pengadilan negeri setempat. 5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung jawab atau Direktur perusahaan. 6. Foto copy NPWP 7. Materai Rp. 6.000.- 1 (satu) lbr 8. Rekomendasi Instansi teknis terkait, bila dipersyaratkan.

**BIAYA**

Tidak ada biaya

**WAKTU**

3 (tiga) hari kerja apabila persyaratan lengkap dan benar.

**d. Perusahaan yang Berbentuk Perorangan****PERSYARATAN**

1. Permohonan, 2. Foto copy Izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. 3. Surat kuasa untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direktur/pimpinan perusahaan. 4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 5. Foto Copy NPWP. 6. Materai Rp. 6.000 1 (satu) lbr 7. Rekomendasi Instansi teknis terkait, bila dipersyaratkan

**BIAYA**

Tidak dikenakan biaya/gratis

**WAKTU**

3 (tiga) hari kerja apabila persyaratan lengkap dan benar.

#### **e. Perusahaan yang berbentuk badan usaha lain**

1. Permohonan. 2. Foto copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang. 3. Surat kuasa untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direktur/pimpinan perusahaan. 4. Foto copy akta notaris pendirian perusahaan yang telah didaftarkan pada pengadilan negeri setempat. 5. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) Penanggung jawab atau Direktur perusahaan. 6. Foto Copy NPWP 7. Mterai Rp. 6.000 1 (Satu) lbr 8. Rekomendasi Instansi teknis terkait, bila dipersyaratkan.

#### **BIAYA**

Tidak ada biaya

#### **WAKTU**

3 (tiga) hari kerja apabila persyaratan lengkap dan benar.

### **2. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) PENDAFTARAN ULANG**

#### **PERSYARATAN**

1. Permohonan. 2. Tanda Daftar Perusahaan Asli 3. Materai Rp. 6.000 1 (satu) lbr 4. Rekomendasi Instansi Teknis terkait, bila dipersyaratkan

#### **BIAYA**

Tidak ada biaya

#### **WAKTU**

3 (tiga) hari kerja apabila persyaratan lengkap dan benar.

### **3. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) PEMBUKAAN KANTOR CABANG/PERWAKILAN PERSYARATAN**

#### **PERSYARATAN**

1. Permohonan. 2. Foto Copy Izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang. 3. Surat kuasa untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan 4. Surat penunjukan atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu sebagai kantor cabang, kantor pembantu dan perwakilan Perusahaan. 5. Foto copy pendirian perusahaan yang telah didaftarkan pada Pengadilan negeri setempat. 6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung jawab atau Direktur Perusahaan. 7. Foto copy NPWP 8. Materai Rp. 6.000 1 (satu) lbr 9. Rekomendasi Instansi Teknis terkait, bila dipersyaratkan.

#### **BIAYA**

Tidak dikenakan biaya/gratis

#### **WAKTU**

3 (tiga) hari kerja apabila persyaratan lengkap dan benar.

### **4. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) PERUBAHAN**

#### **PERSYARATAN**

1. Permohonan. 2. Foto copy Izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang. 3. Surat kuasa untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direktur/Pimpinan perusahaan. 4. Tanda daftar Perusahaan Asli 5. Data pendukung perubahan. 6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung jawab atau Direktur Perusahaan. 7. Materai Rp. 6.000,- 1 (satu) lbr 8. Rekomendasi Instansi Teknis terkait, bila dipersyaratkan.

#### **BIAYA**

Tidak dikenakan biaya/gratis

#### **WAKTU**

3 (tiga) hari kerja apabila persyaratan lengkap dan benar.

## **5. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) PENGGANTIAN**

### **A. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) Yang hilang**

1. Permohonan. 2. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian. 3. Foto copy tanda daftar perusahaan lama.

#### **BIAYA**

Tidak ada biaya

#### **WAKTU**

3 (tiga) hari kerja apabila persyaratan lengkap dan benar.

### **B. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) Yang rusak**

#### **PERSYARATAN**

1. Permohonan. 2. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan lama

#### **BIAYA**

Tidak ada biaya

#### **WAKTU**

3 (tiga) hari kerja apabila persyaratan lengkap dan benar.

## **13. TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)**

### **PERSYARATAN**

1. Permohonan. 2. Surat Kuasa untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direktur/pimpinan perusahaan. 3. Foto copy surat tempat usaha (SITU) 4. Foto copy izin gangguan (HO) 5. Foto copy KTP 6. Materai Rp. 6.000, sebanyak 2 (dua) lbr 7. Data peralatan kapasitas produksi, modal dan tenaga kerja/blangko isian TDI (Form Pdf.1 -IK). 8. Khusus untuk CV, mencantumkan. A. Foto copy Akta Pendirian. B. Foto Copy NPWP 9. Khusus untuk perseroan terbatas (PT) dan Koperasi, selain Persyaratan tersebut diatas dilengkapi dengan A. Surat Keputusan Menteri Hukum (Khusus PT) B. Surat Keputusan Menteri Koperasi (Khusus Koperasi) C. Data Akta

#### **BIAYA**

Tidak dikenakan biaya/gratis

#### **WAKTU**

3 (tiga) hari kerja apabila persyaratan lengkap dan benar.

#### **14. IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)**

1. Permohonan. 2. Surat kuasa untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direktur/pimpinan perusahaan. 3. Foto copy izin prinsip penanaman modal 4. foto copy surat tempat usaha (SITU) 5. Foto copy izin gangguan (HO) 6. Foto Copy IMB 7. Foto copy KTP 8. Foto copy NPWP 9. Materai Rp. 6.000, sebanyak 2 (dua) lbr 10. Data Peralatan, kapasitas produksi, modal dan tenaga kerja/ blangko isian IUI (Form SP-III) 11. Perusahaan yang berbadan hukum melampirkan Akte Pendirian Perusahaan: A. Khusus PT Pengesahan Badan Hukum dari Kementrian Hukum HAM B. Khusus Koperasi pengesahan badan hukum. 12. Bukti Penguasaan Tanah 13. Izin Lokasi 14. Pemanfaatan ruang dari Pemerintah Daerah 15. Izin Lingkungan (Amdal, UKL-UPL) 16. Rekomendasi Instansi Teknis bila dipersyaratkan

##### **BIAYA**

Tidak ada biaya

##### **WAKTU**

3 (tiga) hari kerja apabila persyaratan lengkap dan benar.

#### **B. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) Yang rusak**

##### **PERSYARATAN**

1. Permohonan. 2. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan lama

##### **BIAYA**

Tidak ada biaya

##### **WAKTU**

3 (tiga) hari kerja apabila persyaratan lengkap dan benar.

#### **15. TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)**

##### **PERSYARATAN**

1. Permohonan. 2. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan lama

##### **BIAYA**

Tidak ada biaya

##### **WAKTU**

3 (tiga) hari kerja apabila persyaratan lengkap dan benar.

## **PERIZINAN DIBIDANG PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

### **16. IZIN USAHA JASA LAYANAN INTERNET/ WARNET**

#### **PERSYARATAN**

1. Permohonan 2. Foto Copy Akta Perusahaan bagi yang berbadan hukum 3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 4. Foto Copy NPWP 5. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm berwarna, sebanyak 2 (dua) lembar 6. Surat Pernyataan Tidak Keberatan tetangga/ lingkungan diketahui wali nagari 7. Foto Copy Izin Gangguan 8. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 9. Denah Lokasi 10. Rekomendasi Instansi teknis terkait bila dipersyaratkan.

#### **BIAYA**

Tidak dikenakan biaya/gratis

#### **WAKTU**

3 (tiga) hari kerja apabila persyaratan lengkap dan benar.

### **17. IZIN MENDIRIKAN TOWER MENARA TELEKOMUNIKASI**

#### **PERSYARATAN**

1. Permohonan 2. Surat kuasa untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi / pimpinan perusahaan 3. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan yang berbadan hukum 4. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk 6. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm berwarna, sebanyak 2 (dua) lembar 7. Surat Keputusan ketinggian menara/ tower Dinas Perhubungan Propinsi 8. Sertifikat Bebas Radiasi Berbahaya 9. Izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar 10. RAB Tower 11. Pernyataan Izin warga diketahui oleh wali nagari dan camat setempat 12. Status Tanah 13. Foto Copy Izin Gangguan 14. Foto Copy IMB 15. Rekomendasi Instansi teknis terkait bila dipersyaratkan.

#### **BIAYA**

Tidak dikenakan biaya/gratis

#### **WAKTU**

7 (tujuh) hari kerja apabila persyaratan lengkap dan benar .

### **18. IZIN USAHA KENDARAAN BERMOTOR UMUM**

#### **PERSYARATAN**

1. Permohonan 2. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan yang berbadan hukum 3. Memiliki Surat Izin Usaha Angkutan 4. Menandatangani Surat Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban memegang izin trayek. 5. Memiliki / menguasai kendaraan bermotor yang layak jalan yang dibuktikan dengan foto copy STNK sesuai domisili perusahaan dan foto copy uji kendaraan bermotor 6. Menguasai fasilitas penyimpanan/ full kendaraan yang dibuktikan\ dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai kepemilikan/ penguasaan 7. Memiliki / bekerja sama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan, sehingga dapat merawat kendaraan untuk tetap beroperasi/ layak jalan 8. Surat Keterangan kondisi usaha seperti permodalan dan SDM 9. Surat keterangan komitmen usaha seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan Standar pelayanan yang akan diterapkan.

#### **BIAYA**

Tidak ada biaya

#### **WAKTU**

14 (empat belas) hari kerja apabila persyaratan lengkap dan benar

## **PERIZINAN DIBIDANG PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN**

### **19. IZIN USAHA MENDIRIKAN MESIN PENGGILOAN PADI (HULLER)**

#### **PERSYARATAN**

1. Permohonan 2. Surat kuasa untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/ pimpinan perusahaan 3. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan yang berbadan hukum 4. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 6. Pas Foto ukuran 3 x 4, sebanyak 2 (dua) lembar 7. Status Tanah 8. Pernyataan izin warga sekitar diketahui oleh wali nagari dan camat setempat 9. Rekomendasi Dinas Pertanian tentang luas kawasan sawah 10. Foto Copy Izin Gangguan 11. Foto Copy IMB 12. Rekomendasi Instansi terkait bila dipersyaratkan

#### **BIAYA**

Tidak dikenakan biaya/gratis

#### **WAKTU**

7 (tujuh) hari kerja apabila persyaratan lengkap dan benar

### **20. IZIN USAHA PABRIK PENGOLAHAN (IUP-P)**

#### **PERSYARATAN**

1. Permohonan 2. Surat kuasa untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/ pimpinan perusahaan 3. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan yang berbadan hukum 4. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 6. Status Tanah 7. Pernyataan izin warga sekitar diketahui oleh wali nagari dan camat setempat 8. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 9. Foto Copy Izin Gangguan 10. Foto Copy IMB 11. Izin Prinsip Penanaman Modal 12. Izin Lokasi 13. Jaminan Pasokan bahan baku 14. Rencana Kerja Pembangunan Usaha Industri 15. Pemanfaatan ruang dari Pemerintah Daerah 16. Izin Lingkungan (Amdal, UKL-UPL) 17. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan 18. Rekomendasi Instansi teknis terkait bila dipersyaratkan.

#### **BIAYA**

Tidak dikenakan biaya/gratis

#### **WAKTU**

14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai pengajuan permohonan dengan syarat bahan-bahan sudah lengkap .

## **21. IZIN USAHA PERKEBUNAN BUDI DAYA (IUP-B)**

### **PERSYARATAN**

1. Permohonan 2. Surat kuasa untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/ pimpinan perusahaan 3. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan yang berbadan hukum 4. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 6. Status Tanah 7. Pernyataan izin warga sekitar diketahui oleh wali nagari dan camat setempat 8. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 9. Izin Prinsip Penanaman Modal 10. Izin Lokasi 11. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila real yang diminta berasal dari kawasan hutan 12. Rencana Kerja pembangunan masyarakat sekitar, rencana tempat hasil produksi untuk diolah 13. Pemanfaatan ruang dari Pemerintah Daerah 14. Izin Lingkungan (Amdal, UKL-UPL) 15. Pernyataan kesanggupan : a. Memiliki sumber daya manusia, sarana prasarana dan sistim untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) b. Memiliki sumber daya manusia, sarana prasarana dan sistim untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran c. Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan d. Melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan 16. Rekomendasi Instansi terkait bila dipersyaratkan.

### **BIAYA**

Tidak ada biaya

### **WAKTU**

14 (empat belas) hari kerja apabila persyaratan lengkap dan benar

## **22. IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP)**

### **PERSYARATAN**

1. Permohonan 2. Profil Perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di kementerian hukum dan Ham, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan 3. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 5. Status Tanah 6. Pernyataan izin warga sekitar diketahui oleh wali nagari dan camat setempat 7. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 8. Izin Prinsip Penanaman Modal 9. Izin Lokasi 10. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila real yang diminta berasal dari kawasan hutan 11. Rencana Kerja pembangunan masyarakat sekitar, rencana tempat hasil produksi untuk diolah 12. Pemanfaatan ruang dari Pemerintah Daerah 13. Izin Lingkungan (Amdal, UKL-UPL) 14. Pernyataan kesanggupan : a. Memiliki sumber daya manusia, sarana prasarana dan sistim untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) b. Memiliki sumber daya manusia, sarana prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran c. Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan d. Melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan 15. Surat Pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok (grup) perusahaan perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan berlaku 16. Rekomendasi Instansi Teknis terkait bila dipersyaratkan.

### **BIAYA**

Tidak dikenakan biaya/gratis

### **WAKTU**

14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai pengajuan permohonan dengan syarat bahan-bahan sudah lengkap .



### **23. IZIN USAHA PETERNAKAN**

#### **PERSYARATAN**

1. Permohonan 2. Profil Perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di kementerian hukum dan Ham, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan 3. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 5. Status Tanah 6. Pernyataan izin warga sekitar diketahui oleh wali nagari dan camat setempat 7. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 8. Izin Prinsip Penanaman Modal 9. Izin Lokasi 10. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila real yang diminta berasal dari kawasan hutan 11. Rencana Kerja pembangunan masyarakat sekitar, rencana tempat hasil produksi untuk diolah 12. Pemanfaatan ruang dari Pemerintah Daerah 13. Izin Lingkungan (Amdal, UKL-UPL) 14. Rekomendasi Instansi Teknis terkait bila dipersyaratkan.

#### **BIAYA**

Tidak ada biaya

#### **WAKTU**

14 (empat belas) hari kerja apabila persyaratan lengkap dan benar

### **PERIZINAN DIBIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

### **24. IZIN USAHA MENDIRIKAN MESIN PEMECAH BATU (STONE CRUSHER)**

#### **PERSYARATAN**

1. Permohonan 2. Profil Perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di kementerian hukum dan Ham, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan 3. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 5. Status Tanah 6. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 7. Izin Gangguan 8. Izin Mendirikan Bangunan 9. Izin Prinsip Penanaman Modal 10. Rencana Pemenuhan Bahan Baku/ suplai dari perusahaan pemegang izin pertambangan produksi (IUP) 11. Pemanfaatan ruang dari Pemerintah Daerah 12. Izin Lingkungan (Amdal, UKL-UPL) 13. Rekomendasi Instansi Teknis terkait bila dipersyaratkan.

#### **BIAYA**

Tidak dikenakan biaya/gratis

#### **WAKTU**

7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai pengajuan permohonan dengan syarat bahan-bahan sudah lengkap

### **25. IZIN USAHA MENDIRIKAN ASPHAL MIXING PLANT (AMP)**

#### **PERSYARATAN**

1. Permohonan 2. Profil Perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di kementerian hukum dan Ham, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan 3. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 5. Status Tanah 6. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 7. Izin Gangguan 8. Izin Mendirikan Bangunan 9. Izin Prinsip Penanaman Modal 10. Pemanfaatan ruang dari Pemerintah Daerah 11. Izin Lingkungan (Amdal, UKL-UPL) 12. Rekomendasi Instansi Teknis terkait bila dipersyaratkan.

#### **BIAYA**

Tidak dikenakan biaya/gratis

#### **WAKTU**

7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai pengajuan permohonan dengan syarat bahan-bahan sudah lengkap

## **26. IZIN USAHA MENDIRIKAN STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR MINYAK UMUM (SPBU)**

### **PERSYARATAN**

1. Permohonan 2. Profil Perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di kementrian hukum dan Ham, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan 3. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 5. Status Tanah 6. Pernyataan izin warga sekitar diketahui oleh wali nagari dan camat setempat 7. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 8. Izin Prinsip Penanaman Modal 9. Izin Lokasi 10. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila real yang diminta berasal dari kawasan hutan 11. Rencana Kerja pembangunan masyarakat sekitar, rencana tempat hasil produksi untuk diolah 12. Pemanfaatan ruang dari Pemerintah Daerah 13. Izin Lingkungan (Amdal, UKL-UPL) 14. Rekomendasi Instansi Teknis terkait bila dipersyaratkan.

### **BIAYA**

Tidak ada biaya

### **WAKTU**

14 (empat belas) hari kerja apabila persyaratan lengkap dan benar

## **27. IZIN PENUMPUKAN GAS ALAM CAIR/ ELPIJI**

### **PERSYARATAN**

1. Permohonan 2. Akte pendirian perusahaan bagi perusahaan berbadan hukum 3. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 5. Status Tanah 6. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 7. Izin Gangguan 8. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 9. Surat kerjasama / penunjukan dari agen yang telah ditunjuk dari Pertamina sesuai dengan wilayah kerjanya. 10. Rekomendasi Instansi Teknis terkait bila dipersyaratkan

### **BIAYA**

Tidak dikenakan biaya/gratis

### **WAKTU**

5 (lima) hari kerja terhitung mulai pengajuan permohonan dengan syarat bahan-bahan sudah lengkap

## **PERIZINAN DIBIDANG PARIWISATA**

## **28. IZIN MENDIRIKAN HOTEL**

### **PERSYARATAN**

1. Permohonan 2. Profil Perusahaan 3. Foto Copy Akta Pendirian bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum 4. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 6. Pas Foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar 7. Status Tanah 8. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 9. Izin Gangguan 10. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 11. Izin Prinsip Penanaman Modal 12. Izin Lokasi 13. Proposal rencana pembangunan hotel 14. Pemanfaatan ruang dari Pemerintah Daerah 15. Izin Lingkungan (Amdal, UKL-UPL) 16. Rekomendasi Instansi Teknis Terkait bila dipersyaratkan

### **BIAYA**

Tidak dikenakan biaya/gratis

### **WAKTU**

5 (lima) hari kerja terhitung mulai pengajuan permohonan dengan syarat bahan-bahan sudah lengkap

## **29. IZIN MENDIRIKAN RESTORAN**

### **PERSYARATAN**

1. Permohonan 2. Profil Perusahaan 3. Foto Copy Akta Pendirian bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum 4. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 6. Pas Foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar 7. Status Tanah 8. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 9. Izin Gangguan 10. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 11. Rencana pembangunan restoran 12. Izin Lingkungan 13. Rekomendasi Instansi Teknis terkait bila dipersyaratkan

### **BIAYA**

Tidak ada biaya

### **WAKTU**

5 (lima) hari kerja terhitung mulai pengajuan permohonan dengan syarat bahan-bahan sudah lengkap

## **30. IZIN ATRAKSI WISATA**

### **PERSYARATAN**

1. Permohonan 2. Profil Perusahaan 3. Foto Copy Akta Pendirian bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum 4. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 6. Pas Foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar 7. Izin Keramaian 8. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 9. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 10. Izin Gangguan 11. Izin Lingkungan (Amdal, UKL-UPL) 12. Rekomendasi Instansi teknis terkait bila dipersyaratkan

### **BIAYA**

Tidak dikenakan biaya/gratis

### **WAKTU**

3 (tiga) hari kerja terhitung mulai pengajuan permohonan dengan syarat bahan-bahan sudah lengkap

## **PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN**

### **31. IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT**

#### **PERSYARATAN**

1. Permohonan 2. Profil Perusahaan 3. Foto Copy Akta Pendirian bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum 4. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 6. Pas Foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar 7. Status Tanah 8. Study kelayakan rumah sakit 9. Master plan 10. Rekomendasi izin mendirikan bangunan 11. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 12. Izin Gangguan 13. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 14. Izin Prinsip Penanaman Modal 15. Izin Lokasi 16. Proposal rencana pembangunan rumah sakit 17. Pemanfaatan ruang dari Pemerintah Daerah 18. Izin Lingkungan (Amdal, UKL-UPL) 19. Rekomendasi Instansi teknis terkait bila dipersyaratkan.

#### **BIAYA**

Tidak dikenakan biaya/gratis

#### **WAKTU**

14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai pengajuan permohonan dengan syarat bahan-bahan sudah lengkap

### **32. IZIN RUMAH SAKIT KHUSUS**

#### **PERSYARATAN**

1. Permohonan 2. Profil Perusahaan 3. Foto Copy Akta Pendirian bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum 4. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 6. Pas Foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar 7. Status Tanah 8. Study kelayakan rumah sakit 9. Master plan 10. Rekomendasi izin mendirikan bangunan 11. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 12. Izin Gangguan 13. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 14. Izin Prinsip Penanaman Modal 15. Izin Lokasi 16. Proposal rencana pembangunan rumah sakit 17. Pemanfaatan ruang dari Pemerintah Daerah 18. Izin Lingkungan (Amdal, UKL-UPL) 19. Rekomendasi Instansi teknis terkait bila dipersyaratkan

#### **BIAYA**

Tidak ada biaya

#### **WAKTU**

14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai pengajuan permohonan dengan syarat bahan-bahan sudah lengkap

### **33. IZIN USAHA MENDIRIKAN OPTIKAL**

#### **PERSYARATAN**

1. Permohonan 2. Profil Perusahaan 3. Foto Copy Akta Pendirian optikal bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum 4. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 6. Pas Foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar 7. Status Tanah 8. Surat Pernyataan kesediaan refraksionis optisien untuk menjadi penanggung jawab pada optikal/ laboratorium optik yang akan didirikan dengan melampirkan : a. Surat Perjanjian pemilik sarana dengan refraksionis optisien. b. Surat keterangan dari pejabat setempat menyatakan bahwa refraksionis optisien calon peanggung jawab bertempat tinggal/ domisili di daerah tersebut. c. Foto Copy ijazah refraksionis optisien yang telah dilegalisir d. Surat keterangan sehat dari dokter e. Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar 9. Surat pernyataan kerja sama dari laboratorium optik tempat pemrosesan lensa-lensa pesanan, bila optikal tidak memiliki laboratorium sendiri. 10. daftar sarana dan peralatan yang akan digunakan 11. Daftar pegawai serta tugas dan fungsinya 12. Surat keterangan dari organisasi/ asosiasi setempat yang menyatakan bahwa refraksionis optisien yang diajukan hanya menjadi penanggung jawab dari optikal yang mengajukan izin tersebut, dan diketahui oleh organisasi pengusaha optikal setempat 13. Surat izin Tempat Usaha (SITU) 14. Izin gangguan 15. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 16. Peta Lokasi 17. Denah Ruangan dengan skala 1 : 100 18. Rekomendasi Instansi teknis terkait bila dipersyaratkan

#### **BIAYA**

Tidak dikenakan biaya/gratis

#### **WAKTU**

5 (lima) hari kerja terhitung mulai pengajuan permohonan dengan syarat bahan-bahan sudah lengkap

### **34. IZIN USAHA MENDIRIKAN APOTIK**

#### **PERSYARATAN**

1. Permohonan 2. Profil Perusahaan 3. Foto Copy Akta Pendirian apotik bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum 4. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 6. Pas Foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar 7. Materai Rp. 6000,- sebanyak 2 lembar 8. Surat izin Tempat Usaha (SITU) 9. Izin gangguan 10. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 11. Foto Copy Surat Penugasan (SP) Apoteker 12. Foto Copy Ijazah Apoteker 13. Denah Ruangan/ bangunan Apotik 14. Daftar Asisten Apoteker (mencantumkan nama, tanggal lulus serta melampirkan surat izin asisten apoteker 15. Salinan Foto Copy Ijazah Apoteker 16. Surat pernyataan APA (yang menyatakan bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan formasi lain dan tidak menjadi APA di Apotik lain) 17. Akta Perjanjian kerjasama Apoteker pengelola Apotik dengan pemilik sarana Apotik 18. Rekomendasi ISFI (Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia) Sumbang 19. Rekomendasi Instansi teknis terkait bila dipersyaratkan.

#### **BIAYA**

Tidak dikenakan biaya/gratis

#### **WAKTU**

5 (lima) hari kerja terhitung mulai pengajuan permohonan dengan syarat bahan-bahan sudah lengkap

### **35. IZIN TOKO OBAT**

#### **PERSYARATAN**

1. Permohonan 2. Foto Copy Akta Pendirian bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum 3. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 5. Pas Foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar 6. Materai Rp. 6000,- sebanyak 2 lembar 7. Surat izin Tempat Usaha (SITU) 8. Izin gangguan 9. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 10. Surat Pernyataan bersedia menjadi penanggung jawab toko obat dari asisten apoteker 11. Foto Copy Ijazah Apoteker 12. Denah Lokasi 13. Rekomendasi Instansi teknis terkait bila dipersyaratkan.

#### **BIAYA**

Tidak ada biaya

#### **WAKTU**

5 (lima) hari kerja terhitung mulai pengajuan permohonan dengan syarat bahan-bahan sudah lengkap

### **36. IZIN MENDIRIKAN DEPOT ISI ULANG AIR MINUM**

#### **PERSYARATAN**

1. Permohonan 2. Foto Copy Akta Pendirian bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum 3. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 5. Materai Rp. 6000,- sebanyak 2 lembar 6. Surat izin Tempat Usaha (SITU) 7. Izin gangguan 8. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 9. Tanda Daftar Industri (TDI) 10. Hasil laboratorium air minum dari instansi terkait 11. Rekomendasi Instansi teknis terkait bila dipersyaratkan

#### **BIAYA**

Tidak dikenakan biaya/gratis

#### **WAKTU**

5 (lima) hari kerja terhitung mulai pengajuan permohonan dengan syarat bahan-bahan sudah lengkap

### **37. IZIN AIR MINUM DALAM KEMASAN**

#### **PERSYARATAN**

1. Permohonan 2. Profil Perusahaan 3. Foto Copy Akta Pendirian bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum 4. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 6. Materai Rp. 6000,- sebanyak 2 lembar 7. Izin Prinsip Penanaman Modal 8. Surat izin Tempat Usaha (SITU) 9. Izin gangguan 10. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 11. Izin Industri (IUI/TDI) 12. SNI dari instansi terkait 13. Hasil laboratorium Air minum dari instansi terkait 14. Izin pengambilan air permukaan/ air bawah tanah 15. Izin Lingkungan (Amdal, UKL-UPL) 16. Surat Jaminan pemasokan air baku dari PDAM/ perusahaan yang memiliki izin pengambilan air dari instansi yang berwenang 17. Rekomendasi Instansi teknis terkait bila dipersyaratkan.

#### **BIAYA**

Tidak dikenakan biaya/gratis

#### **WAKTU**

5 (lima) hari kerja terhitung mulai pengajuan permohonan dengan syarat bahan-bahan sudah lengkap

### **38. IZIN USAHA PRODUKSI MAKANAN DAN MINUMAN**

#### **PERSYARATAN**

1. Permohonan 2. Profil Perusahaan 3. Foto Copy Akta Pendirian bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum 4. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 6. Materai Rp. 6000,- sebanyak 2 lembar 7. Izin Prinsip Penanaman Modal 8. Surat izin Tempat Usaha (SITU) 9. Izin gangguan 10. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 11. Izin Industri (IUI/TDI) 12. Surat Jaminan pemasokan air baku dari PDAM/ perusahaan yang memiliki izin pengambilan air dari instansi yang berwenang 13. Rekomendasi Instansi teknis terkait bila dipersyaratkan.

#### **BIAYA**

Tidak ada biaya

#### **WAKTU**

5 (lima) hari kerja terhitung mulai pengajuan permohonan dengan syarat bahan-bahan sudah lengkap

### **39. IZIN PENGobatan TRADISIONAL**

#### **PERSYARATAN**

1. Permohonan 2. Biodata pengobatan tradisional 3. Foto Copy Ijazah/ Sertifikat pengobatan tradisional yang dimiliki 4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 5. Materai Rp. 6000,- sebanyak 2 lembar 6. Surat Pengantar dari puskesmas setempat 7. Pas Foto ukuran 4 x 6, sebanyak 2 lembar 8. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 9. Izin gangguan 10. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 11. Surat Keterangan wali nagari tempat melakukan pekerjaan sebagai pengobatan tradisional 12. Rekomendasi dari asosiasi/ organisasi profesi di bidang tradisional yang bersangkutan. 13. Rekomendasi kejaksaan bagi pengobatan tradisional klasifikasi supranatural 14. Rekomendasi Kantor Depag bagi Pengobatan Tradisional Klasifikasi Pendekatan Agama 15. Rekomendasi Instansi teknis terkait bila dipersyaratkan.

#### **BIAYA**

Tidak dikenakan biaya/gratis

#### **WAKTU**

5 (lima) hari kerja terhitung mulai pengajuan permohonan dengan syarat bahan-bahan sudah lengkap

### **40. IZIN SALON DAN RUMAH KECANTIKAN**

#### **PERSYARATAN**

1. Permohonan 2. Biodata ahli kecantikan 3. Foto Copy Ijazah/ Sertifikat keahlian kecantikan yang dimiliki 4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 5. Materai Rp. 6000,- sebanyak 2 lembar 6. Pas Foto ukuran 4 x 6, sebanyak 2 lembar 7. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 8. Izin gangguan 9. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 10. Rekomendasi Instansi teknis terkait bila dipersyaratkan.

#### **BIAYA**

Tidak dikenakan biaya/gratis

#### **WAKTU**

5 (lima) hari kerja terhitung mulai pengajuan permohonan dengan syarat bahan-bahan sudah lengkap

## **PERIZINAN DIBIDANG TATA PEMERINTAHAN**

### **41. IZIN GANGGUAN (HO)**

#### **PERSYARATAN**

1. Permohonan 2. Profil Perusahaan 3. Foto Copy Akta pendirian bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum 4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 5. Pas Foto ukuran 3 x 4, sebanyak 2 lembar 6. Surat Pernyataan status tanah, diketahui camat setempat 7. Rekomendasi Camat Setempat 8. Berita acara pemeriksaan lapangan 9. Denah lokasi tempat usaha 10. Surat pernyataan pencegahan dan pencemaran lingkungan 11. Surat pernyataan persetujuan tetangga/ lingkungan 12. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 13. Izin Lingkungan (Amdal, UKL-UPL), bagi yang dipersyaratkan 14. Rekomendasi Instansi teknis terkait bila dipersyaratkan.

#### **BIAYA**

Tidak ada biaya

#### **WAKTU**

15 (lima belas) hari kerja terhitung mulai pengajuan permohonan dengan syarat bahan-bahan sudah lengkap

## **NON PERIZINAN DI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

### **42. IZIN PENELITIAN/ SURVEY**

#### **PERSYARATAN**

Warga Negara Indonesia (WNI) : 1. Permohonan tertulis dari badan/ perguruan tinggi/Instansi/Sekolah 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Mahasiswa 3. Rincian waktu penelitian 4. Proposal Penelitian (Bab I sampai dengan Bab III)

#### **BIAYA**

Tidak dikenakan biaya/gratis

#### **WAKTU**

Lama proses pengurusan izin adalah 3 (tiga) hari kerja

# PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG

FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,05/ 0,5 *)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40
				b. Tidak Sederhana	0,70	2. Sementara jangka panjang	0,70
				c. Khusus	1,00	3. Tetap	1,00
2. Keagamaan	0,00						
3. Usaha	3,00	2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40		
4. Sosial dan Budaya	1,00 **)			b. Semi Permanen	0,70		
5. Khusus	2,00			c. Permanen	1,00		
6. Ganda/ Campuran	4,00	3. Risiko Kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
		4. Zonasi Gempa	0,15	a. Zona I/ minor	0,10		
				b. Zona II/ minor	0,20		
				c. Zona III/ minor	0,40		
				d. Zona IV/ minor	0,50		
				e.. Zona V/ minor	0,70		
				f. Zona VI/ minor	1,00		
		5. Lokasi (Kepadatan bangunan gedung)	0,10	a. Renggang	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Padat	1,00		



## PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG

1	2	3	4	5	6	7	8
		6. Ketinggian bangunan gedung	0,10	a. Rendah	0,40	( 1 – 4 Lantai )	
				b. Sedang	0,70	( 4 – 8 Lantai )	
				c. Tinggi	1,00	( > 8 Lantai )	
		7. Kepemilikan	0,05	a. Negara/ Yayasan	0,40		
				b. Perorangan	0,70		
				c. Badan Usaha swasta	1,00		

### Catatan

1. \*) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
2. \*\*) Indeks 0,00 untuk bangunan/ gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum dan usaha.
3. Bangunan Gedung, atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah (basemen), di atas/ bawah air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambah 1,30

### Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung (HSbg)

- a. Wilayah Ibukota Kabupaten sebesar Rp. 12.500,-
- b. Wilayah lain diluar Ibukota Kabupaten sebesar Rp. 10.000,-

## RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

:  
INDEKS GANGGUAN

No	Jenis Usaha	Indeks Gangguan
1.	Usaha yang wajib AMDAL	3
2.	Usaha yang wajib UKL - UPL	2
3.	Usaha yang wajib SPPL	1

INDEKS LOKASI :

No	Jenis Usaha	Indeks Gangguan
1.	Jalan Negara	4
2.	Jalan Propinsi	3
3.	Jalan Kabupaten	2
4.	Jalan Desa	1

## RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

### INDEKS VOLUME CAIRAN :

No	Volume Cairan	Indeks
1.	1 s/d 150 M3/ bulan	1
2.	151 s/d 300 M3/ bulan	3
3.	301 s/d 750 M3/ bulan	5
4.	Di atas 750 M3/ bulan	7

### INDEKS LUAS TEMPAT USAHA

No	Jenis Usaha	Indeks Gangguan
1.	1 s/d 50 M2/ bulan	1
2.	51 s/d 100 M2/ bulan	2
3.	101 s/d 500 M2/ bulan	3
4.	501 s/d 1.000 M2	4
5.	Di atas 1.000 M2	5

### Struktur dan Besar Retribusi

a. Tarif Retribusi untuk usaha berdampak terhadap lingkungan berupa cairan adalah sebesar Rp. 1.000.000,-

b. Tarif Retribusi untuk usaha berdampak terhadap lingkungan berupa non cairan adalah sebesar Rp. 300.000,-



